

**PELATIHAN FPAR**  
**FEMINIST PARTICIPATORY ACTION RESEARCH**  
21 - 28 September 2023



# Laporan Feminist Participatory Action Riset (FPAR)

**Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air  
Poso Energy Terhadap Kehidupan Perempuan  
di Desa Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, Pandiri  
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah**

Didukung oleh:







# **Laporan Feminist Participatory Action Riset (FPAR)**

Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso Energy  
Terhadap Kehidupan Perempuan  
di Desa Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, Pandiri  
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

### **Judul**

Laporan Feminist Participatory Action Riset (FPAR)  
Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso Energy Terhadap  
Kehidupan Perempuan  
di Desa Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, Pandiri  
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

### **Tim FPAR :**

Asrin Nua (Mentor dan Peneliti)  
Sofianty Dg Nusu (Peneliti Muda)  
Ester Pasolawa (Peneliti Desa Saojo )  
Malvin Baduge (Peneliti Desa Sulewana)  
Yufningsih Banumbu (Peneliti Desa Tampemadoro)  
Wemi Ngau (Peneliti Desa Kuku)  
Verawati (Peneliti Desa Pandiri)

### **Editor :**

Kurnia Widyawati

### **Layout :**

Enday Hidayat

### **DITERBITKAN :**

Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso  
Juli 2025

## Daftar Isi

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Daftar Singkatan .....                     | i  |
| Kata Pengantar.....                        | ii |
| Ringkasan Eksekutif .....                  | 1  |
| Bagian 1: Rencana dan Pembaruan FPAR ..... | 3  |
| Pendahuluan .....                          | 3  |
| Perencanaan FPAR dengan Komunitas.....     | 9  |
| Lingkup FPAR .....                         | 21 |
| Bagian 2: Profil Proyek .....              | 29 |
| Profil Proyek.....                         | 29 |
| Bagian 3: Temuan dan Analisis FPAR .....   | 32 |
| Temuan Utama .....                         | 32 |
| Analisis Kebijakan Nasional dan Lokal..... | 44 |
| Inisiatif Perempuan .....                  | 46 |
| Bagian 4: Kesimpulan dan Rekomendasi ..... | 49 |
| Kesimpulan dan Rekomendasi.....            | 49 |
| Advokasi .....                             | 52 |
| LAMPIRAN .....                             | 53 |
| Lampiran A: Laporan kegiatan.....          | 53 |
| Lampiran B: Refleksi peneliti.....         | 60 |
| Lampiran C: Profil perempuan .....         | 63 |
| Lampiran D: Pengumpulan data .....         | 66 |



## Daftar Singkatan

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PT</b>    | Perseroan Terbatas                                      |
| <b>PLTA</b>  | Pembangkit Listrik Tenaga Air                           |
| <b>NDA</b>   | National Designated Authority                           |
| <b>NDC</b>   | Nationally Determined Contribution                      |
| <b>MW</b>    | Megawatt                                                |
| <b>FPAR</b>  | Feminist Participatory Action Research                  |
| <b>KFMS</b>  | Kelompok Feminis Muda Sulewana                          |
| <b>PAR</b>   | Perempuan Akar Rumput                                   |
| <b>COP</b>   | Conference of the Parties / Konferensi Para Pihak       |
| <b>CSO</b>   | Civil Society Organisation/ Organisasi Masyarakat Sipil |
| <b>NZE</b>   | Net Zero Emission / Nol emisi                           |
| <b>SP</b>    | Solidaritas Perempuan                                   |
| <b>PERDA</b> | Peraturan Daerah                                        |
| <b>GRK</b>   | Gas Rumah Kaca                                          |
| <b>RAD</b>   | Rencana Aksi Daerah                                     |
| <b>RPJPD</b> | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah               |
| <b>RPJMD</b> | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah              |
| <b>AMDAL</b> | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan                     |



## Kata Pengantar

Kelompok Feminis Muda Sulewana (KFMS) adalah kelompok perempuan muda dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berawal dari kelompok perempuan muda yang diinisiasi bersama Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso dengan serangkaian diskusi dan membentuk gerakan kolektif ini. KFMS meyakini bahwa kekuatan kolektif perempuan muda dapat mengubah perjuangan untuk keadilan perempuan, khususnya perjuangan untuk keadilan terhadap berbagai penindasan yang dihadapi perempuan di 5 Desa di Kabupaten Poso.

Kami melalui dukungan dari Asia Pacific Forum Women Law and Development (APWLD) terlibat dalam penelitian dengan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR), pengalaman dan pengetahuan perempuan di lima desa, yaitu Desa Sulewana, Saojo, Tampemadoro, Kuku dan Pandiri merupakan hal yang utama dalam penelitian partisipatif ini. Pemerintah Desa Sulewana dalam hal ini Sekretaris Desa Sulewana memberikan respon yang baik dalam penelitian ini.

FPAR mempunyai empat pilar, yaitu: feminis, penelitian, aksi dan partisipatif dimana pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi pondasi. KFMS belajar dari setiap pertemuan bersama perempuan mengenai kedekatan perempuan dengan alam, mereka banyak bercerita tentang kehidupan perempuan, pentingnya sungai, tanah dan hutan bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Penelitian ini menjadi perjalanan kolaboratif dan penuh makna yang menyatukan 23 orang perempuan pejuang dari lima desa. Melalui upaya kolektif, kami telah memperoleh wawasan berharga dan kemajuan yang signifikan.

Hasil dari penelitian ini merupakan kerja keras dari semua pihak yang terlibat, termasuk perempuan peneliti dari desa yang mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan.

Poso, Juli 2025  
Tim Peneliti



## Ringkasan Eksekutif

Kondisi geografis Indonesia merupakan kepulauan dengan iklim tropis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, kondisi ini telah meningkatkan risiko bencana yang dialami oleh rakyatnya. Sebagai negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam aksi iklim global melalui partisipasinya dalam Perjanjian Paris pada COP 21 tahun 2015, dengan menetapkan target pengurangan emisi sebesar 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan, termasuk transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan atau energi bersih, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai proyek energi nasional, salah satunya adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berlokasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia.

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso Energy, dikelola oleh PT Poso Energy, dibangun di Sungai Poso di desa Sulewana pada tahun 2003. Sebagian dari Sungai Poso telah dialokasikan untuk pembangunan PLTA ini dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 515 MW. Lima desa yang paling terdampak oleh proyek PLTA ini yaitu Desa Saojo, Desa Sulewana, Desa Kuku, Desa Tampemadoro, dan Desa Pandiri. Pembangunan proyek ini telah merampas lahan perkebunan masyarakat dan mengakibatkan dampak negatif signifikan seperti pencemaran lingkungan, hilangnya mata pencaharian, hilangnya sumber air bersih, dan kerusakan properti (tempat tinggal). Proyek ini mengakibatkan perempuan terdampak secara tidak proporsional akibat kurangnya konsultasi dan tidak adanya analisis dampak gender selama proses pembangunan.

Proyek PLTA merupakan salah satu program energi terbarukan yang dilihat pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perubahan iklim namun implementasi dari proyek PLTA Poso Energy gagal menyelesaikan krisis iklim secara memadai, pembangunannya membutuhkan penilaian komprehensif terhadap potensi paparan kepada masyarakat. Pemerintah hanya melihat energi terbarukan pada konteks target penurunan emisi, tidak melihat hal yang lebih krusial seperti sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Program ini

menjadi penting untuk dikritisi karena menimbulkan persoalan baru, tidak dapat menjawab krisis iklim.

Persoalan baru ini timbul karena ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama di antara perempuan, memperburuk situasi dengan mengabaikan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alam. Kegiatan sehari-hari perempuan terikat erat dengan mata pencaharian dan lingkungan akibatnya, penelitian aksi partisipatif feminis sangat dibutuhkan untuk sepenuhnya memahami dan mengatasi implikasi gender spesifik dari proyek PLTA Poso.

Metodologi penelitian ini sangat penting untuk memperkuat suara perempuan dalam komunitas, mengungkap narasi yang menyesatkan dari proyek tersebut, dan memberikan alternatif yang berkelanjutan yang mempromosikan keadilan lingkungan dan gender. Ketidakhadiran inklusi dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan adil yang menghormati kesejahteraan dan hak-hak semua anggota masyarakat.

# Bagian 1: Rencana dan Pembaruan FPAR

## Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang sudah terjadi dan berdampak terhadap kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim seperti kenaikan air laut dan peristiwa ekstrim akibat perubahan cuaca seperti banjir dan kekeringan. Perkiraan suhu udara rata - rata nasional selama periode normal tercatat 26,7°C sementara suhu udara rata - rata tahun 2024 meningkat 27,5°C dengan demikian tercatat anomali suhu udara positif sebesar 0,8°C pada tahun 2024. Secara kumulatif suhu udara Indonesia meningkat 0,9°C dalam kurun waktu 44 tahun terakhir (1981- 2024). Hal ini mengakibatkan kenaikan permukaan air laut berdasarkan data satelit menunjukkan tren naik 4,3/0,4 mm/tahun.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan berkomitmen dalam Perjanjian Paris Agreement pada pertemuan COP 21 pada 2015 di Paris, untuk menekan kenaikan suhu secara global tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan menjadi 1,5°C dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 358 – 446 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) upaya ini akan dicapai melalui pengembangan energi terbarukan melalui penerapan efisiensi energi, dan konservasi energi serta penerapan teknologi energi bersih.<sup>2</sup>

Dalam dokumen NDC 2021, ditargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.<sup>3</sup> Pemerintah juga menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang menjadi dasar berbagai kebijakan dan proyek terkait transisi energi.

Kebijakan lainnya seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan kebijakan yang mengatur

---

<sup>1</sup> catatan iklim dan kualitas udara tahun Indonesia 2024 BMKG

<sup>2</sup> Analisis-Kebijakan-Transisi-Energi-dan-Trilema-Energi-di-Indonesia-Periode-2019-2024\_web.pdf

<sup>3</sup> Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29% (unconditional) dan 41% (conditional) pada dokumen NDC sebelumnya menjadi 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional) dan 43,20% dengan bantuan internasional (conditional) pada tahun 2030.

tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, negara Indonesia merupakan salah satu anggota yang telah meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW mendorong negara-negara untuk memastikan perempuan dan kelompok rentan lainnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Serta memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap proses pembangunan baik melalui perencanaan, pendanaan, hingga monitoring.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan pengelolaan energi harus didasarkan pada prinsip utilitas, keberlanjutan, kesejahteraan publik, serta perlindungan lingkungan. Komitmen ini juga tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 2022, tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Indonesia juga telah membuat Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), mencakup target bauran pasokan energi dengan meningkatkan energi baru terbarukan, antara lain meningkatkan porsi energi terbarukan setidaknya 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Komitmen tersebut berimplikasi pada perubahan sektor energi Indonesia menuju perekonomian rendah emisi karbon menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menggalakkan proyek-proyek energi yang diklaim sebagai solusi atas krisis iklim melalui upaya transisi energi fosil menuju energi bersih, baru dan terbarukan salah satunya pengembangan proyek hydro power atau energi yang bersumber dari air atau air terjun.

Secara spesifik, di Sulawesi Tengah saat ini tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), RAD ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tengah 2025-2045 yang menargetkan penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Meski RAD tersebut masih tahap penyusunan. Meski kebijakan RAD tersebut masih dalam tahap penyusunan, sebenarnya pemerintah Sulawesi Tengah telah memiliki komitmen pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan penghidupan. Melalui Peraturan Daerah No 5 tahun 2021, tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang menjadi aturan

turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, meskipun telah banyak berbagai perjanjian, komitmen dan kebijakan yang berbicara terkait penurunan gas emisi rumah kaca, keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, perlindungan masyarakat bahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik pada implementasinya. Dapat dilihat dari pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso oleh PT Poso Energy di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Proyek ini telah menimbulkan dampak negatif signifikan pada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar aliran Sungai Poso, ada 5 wilayah yang paling terdampak yaitu : *Desa Saojo, Desa Sulewana, Desa Kuku, Desa Tampemadoro, dan Desa Pandiri*. Proyek PLTA membangun bendungan di aliran sungai, sumber air utama berasal dari Danau Poso. Danau Poso merupakan danau terbesar keempat di Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Indonesia memiliki panjang 32 km dengan luas 16 km .<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ditegaskan bahwa pengelolaan energi harus didasarkan pada prinsip utilitas, keberlanjutan, kesejahteraan publik, serta perlindungan lingkungan. Secara prinsip, proyek PLTA Poso diharapkan memenuhi asas keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan, seperti dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di sekitar wilayah proyek, yang dapat bertentangan dengan semangat UU tersebut jika tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan turunannya seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), pembangunan bendungan dan PLTA masuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan dengan

---

<sup>4</sup>Lihat <https://goodstats.id/article/5-danau-terluas-di-indonesia>

risiko menengah tinggi yang umumnya mensyaratkan dokumen lingkungan berupa AMDAL.

Dokumen AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi secara sistematis dampak-dampak potensial dari proyek suatu proyek atau usaha, baik dampak positif maupun negatif, terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. adanya dokumen ini menjadi bahan evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan layak atau tidaknya rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di suatu lokasi rencana pembangunan

Dokumen AMDAL harus disusun dengan melibatkan seluruh entitas masyarakat setempat, berdasarkan asas penyediaan informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan guna memastikan seluruh masyarakat dan perempuan dapat berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan proyek, untuk mengurangi potensi konflik sosial di kemudian hari. Namun demikian, setelah berlakunya undang-undang Cipta kerja, membuat persyaratan dokumen analisis lingkungan atau AMDAL menjadi lebih mudah dan sederhana dilakukan. Meskipun energi terbarukan memiliki narasi tersendiri, eksplorasi tenaga air tidak benar-benar mengurangi krisis iklim, dan pengembangannya memerlukan penilaian yang cermat terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Pada tahun 2003 dimulai pembangunan, tanpa adanya pemberitahuan yang komprehensif dan partisipatif bermakna, lahan perkebunan masyarakat di desa khususnya Desa Sulewana dan Desa Saojo dibebaskan untuk pembangunan proyek. masyarakat yang lahannya termasuk dalam area proyek terpaksa menyerahkan lahan perkebunannya karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak proyek yang didukung oleh pemerintah yang diklaim sebagai kepentingan umum.

Pengambilalihan lahan telah menghilangkan sumber penghasilan utama banyak orang, terutama petani perempuan. Selain itu, proyek ini mengabaikan masalah

lingkungan dan mencemari Sungai Poso.<sup>5</sup> Sungai ini sangat penting bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitarnya. Air sungai yang bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama oleh perempuan yang menjalankan peran tradisional sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan air dan makanan untuk keluarga. Perempuan biasanya memasak dan mengambil air minum dari sungai. Namun, sejak proyek PLTA membangun bendungan, mereka tidak mau lagi menggunakan air sungai karena sudah tercemar limbah semen dan minyak dari perusahaan. Karena tidak ada lagi sumber air bersih, perempuan terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan rumah tangga. Mayoritas pekerjaan masyarakat di lima desa ini adalah petani dan nelayan sungai, laki-laki maupun perempuan bekerja sama mengelola lahan dan menangkap ikan di sungai.

Tahun 2016–2021 ada rencana revitalisasi danau dan sungai yang dituang dalam dokumen pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso. Revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan volume air sungai agar dapat mengalir lebih kuat menuju lokasi PLTA tersebut yang akan digunakan untuk menghasilkan listrik. Revitalisasi ini mendapat penolakan dari beberapa organisasi yang fokus di isu lingkungan karena dianggap dapat mengganggu kehidupan biota sungai dan itu akan berdampak pada ekosistem setempat. Aktivitas pengerukan ini dilakukan sepanjang 12,8 km mulai dari hulu sungai, hal ini sangat berdampak terhadap nelayan sungai.<sup>6</sup> Nelayan sungai terdampak karena pagar sogili/alat tradisional menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan menjadi rusak dan akhirnya harus dikeluarkan dari sungai. Akibatnya, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan pendapatan ekonomi keluarga menurun.

Bagi perempuan, dampaknya akan berlapis dari meningkatnya beban kerja domestik dan peran ganda seperti perempuan terpaksa ikut berperan sebagai penopang ekonomi tambahan dengan bekerja informal atau bekerja paruh waktu hal ini menambah beban kerja perempuan karena tanggung jawab domestik dan perawatan anak yang tidak berkurang akibatnya tubuh perempuan bisa mengalami kelelahan fisik dan mental yang berlebihan situasi tersebut menjadikan perempuan akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Perempuan memiliki peran gender yang dikonstruksikan pada kerja - kerja

---

<sup>5</sup> Catatan tahunan Solidaritas Perempuan 2024, Perempuan Melawan Pemiskinan 34 tahun berjuang bersama perempuan akar rumput

<sup>6</sup> [https://drive.google.com/file/d/1GFqnHg-y9h3QzqJ\\_PVL99wR61Xj\\_b0NX/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1GFqnHg-y9h3QzqJ_PVL99wR61Xj_b0NX/view?usp=sharing)

perawatan dan penyedia pangan bagi keluarganya. Proyek PLTA telah merampas sumber - sumber kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Situasi ini juga dipersulit dengan tidak ada informasi dan partisipasi bermakna dari perempuan dalam menentukan pembangunan di desanya, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan dan kapasitas, sehingga sangat jarang perempuan dilibatkan dalam rapat – rapat pengambilan keputusan di desa, hal ini karena sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi, terutama bagi perempuan yang selama ini sering terpinggirkan dan suaranya dibungkam. Penelitian Feminist Participatory Action Research (FPAR) menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam proses penggalian data dan analisis. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan memahami akar penyebab penderitaan yang dialami perempuan di lima desa yang paling terdampak oleh pembangunan PLTA Poso Energy di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pembangunan PLTA yang diklaim sebagai bagian dari solusi krisis iklim justru telah menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini adalah solusi palsu, karena hanya berfokus pada pencapaian target energi terbarukan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekologis. Penelitian ini berupaya menggugat pendekatan pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat, serta mendorong model transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat khususnya perempuan.

Metodologi penelitian ini sangat penting untuk memperkuat pengalaman perempuan dalam komunitas, mengungkap persepsi yang menyesatkan tentang proyek tersebut, dan mengembangkan solusi alternatif dan jangka panjang yang mempromosikan keadilan lingkungan dan gender. Kurangnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang lebih adil yang mempertimbangkan kesejahteraan dan agensi semua anggota masyarakat.

# Perencanaan FPAR dengan Komunitas

## Konsultasi Pra-Penelitian

Kegiatan identifikasi awal perempuan di lima desa, yaitu Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, dan Pandiri.

Mentor dan peneliti muda melakukan identifikasi awal perempuan yang akan terlibat dalam penelitian FPAR. Di Desa Sulewana, KFMS bertemu dengan Ibu Malvin Baduge, seorang perempuan petani di Desa Sulewana. KFMS mendiskusikan bersama maksud dan tujuan penelitian bersama dengan perempuan terkait proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah beroperasi saat ini di Desa Sulewana. Ibu Malvin, sebagai perempuan yang terdampak mempunyai kebutuhan yang sama serta menceritakan situasi rumahnya yang telah rusak dengan indikasi karena aktivitas PLTA Poso Energy. Diskusi dengan Ibu Malvin berlanjut dengan kebutuhan identifikasi di 4 Desa lainnya, yaitu: Desa Saojo, Kuku, Tampemadoro dan Pandiri.

Selain dengan Ibu Malvin dari Desa Sulewana, KFMS melanjutkan diskusi dengan 4 perempuan, yaitu: Ibu Ester Pasolawa- perempuan petani vanili di Desa Saojo, ibu Wemi Nggau-perempuan petani durian, menanam tanaman obat – obatan di pekarangan rumah dari Desa Kuku, ibu Yufningsih Banumbu- perempuan petani dan penyuluh anak dari Desa Tampemadoro, ibu Verawati-perempuan petani dan Ketua kader Posyandu dari Desa Pandiri. Kelima perempuan ini memiliki keinginan dan kebutuhan terlibat langsung dalam penelitian FPAR tentang dampak proyek PLTA yang ada di Kabupaten Poso.

Sebelum memulai FPAR, KFMS bersama 5 perempuan di 5 Desa bersama 18 perempuan akar rumput lainnya dari 5 Desa menjadi peserta FPAR dan akan terlibat dalam kegiatan lainnya selama penelitian. Pelatihan FPAR berlangsung pada tanggal 21-22 November 2023 di Poso Kota, Sulawesi Tengah. Selama kegiatan ini, peserta diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai target pencapaian yang ingin mereka ubah serta membangun komitmen bersama untuk mengubahnya melalui agenda FPAR. Lokasi penelitian dilakukan di desanya masing- masing yakni Desa Saojo, Sulewana, Kuku, Tampemadoro dan Pandiri.

Desa Saojo dan Desa Sulewana dengan lokasi tidak begitu jauh dari bendungan PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 dengan kapasitas energy listrik yang dihasilkan 515 MW. Desa Kuku merupakan desa ketiga yang dilewati dari sumber utama air sungai yaitu danau poso setelah Desa Saojo dan Sulewana. Kemudian Desa Tampemadoro merupakan desa ke empat yang dilewati yang juga menjadi lokasi rencana perluasan PLTA Poso ke 3. Selanjutnya desa Pandiri merupakan desa kelima yang juga direncanakan akan menjadi lokasi perluasan PLTA Poso ke 4.



Gambar perempuan akar rumput sedang presentasi dalam kegiatan Pelatihan FPAR/ pelatihan partisipasi aksi riset feminis, sumber foto KFMS

Konsultasi pra-penelitian ini merupakan titik balik yang menarik bagi para peserta. Mereka tidak hanya mendapatkan kesadaran yang lebih baik tentang penyebab mendasar masalah mereka tetapi juga menemukan kekuatan batin untuk menciptakan perubahan. Melalui FPAR, mereka telah mengembangkan visi bersama untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata-kata kuat para peserta, seperti 'Saya merasa seperti tersambar petir karena ketidakadilan' menunjukkan pengaruh mendalam dari pertemuan ini. Keberhasilan konsultasi pra-penelitian kami menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktif dan

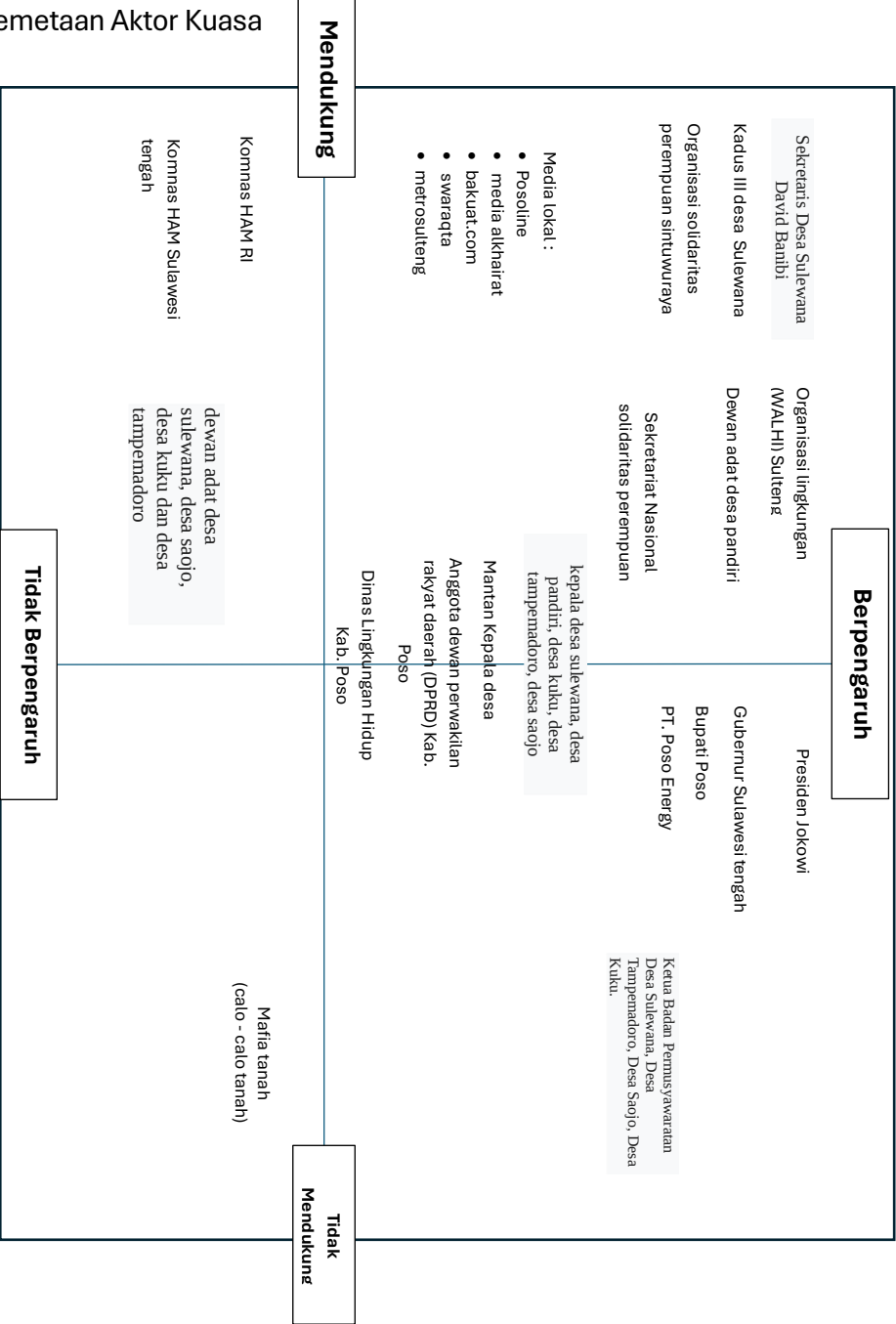
kepemimpinan perempuan, kami dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang.

**Tujuan Dampak:** Hasil konsultasi pra-penelitian telah berubah menjadi visi yang kuat: Perempuan dari lima desa di Poso secara tegas menolak proyek PLTA Poso Energy sebagai solusi perubahan iklim. Penolakan tersebut didasarkan pada kesadaran yang luas tentang dampak berbahaya proyek tersebut terhadap kehidupan mereka dan lingkungan.

**Peta Kekuasaan:**

Pada proses training FPAR kami telah mendengarkan banyak masalah yang telah terjadi masalah sosial, ekonomi, kerusakan tempat tinggal dan kerusakan lingkungan. Olehnya penting untuk melihat aktor yang menyebabkan masalah saat ini, juga penting untuk mengetahui aktor pendukung yang bisa membantu komunitas perempuan dalam melakukan advokasi. Berikut ilustrasi pemetaan aktor yang kami lakukan bersama perempuan peserta FPAR.

Pemetaan Aktor Kuasa



➤ Aktor yang mendukung

Dari pemetaan aktor di atas kami mengidentifikasi jaringan pendukung yang bekerja sama dengan kami, walaupun organisasi KFMS masih baru terbentuk, namun kami telah banyak belajar dari organisasi masyarakat sipil di Poso yang telah melakukan kerja – kerja pengorganisasian dan advokasi hak – hak perempuan, dan hak lingkungan seperti Solidaritas Perempuan Poso, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poso. Salah satu basis identifikasi adalah tersebut adalah aksi demonstrasi tahun 2022 di depan pintu masuk masuk proyek PLTA Poso 2, yang diinisiasi oleh komunitas perempuan di Desa Sulewana yang rumahnya terdampak akibat aktivitas perusahaan PLTA dengan diikuti dan didukung organisasi masyarakat sipil seperti SP-Poso dan Walhi Sulteng serta Pemerintahan Desa, yaitu Sekretaris Desa Sulewana dan Kepala Dusun III yang ikut dalam perjuangan aksi menuntut hak perempuan sulewana atas kerusakan rumah dan gereja yang terdampak. Walaupun ada perintah dari Kepala Desa bahwa pihak pemerintah desa tidak boleh terlibat dalam aksi protes.

Saat KMFS melakukan konsultasi ke Pemerintah Desa Sulewana, Sekretaris Desa Sulewana memberikan dukungan terhadap FPAR dengan mengatakan *“jika butuh bantuan sampaikan kepada saya, saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya”*. Media lokal juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan mendorong dukungan publik terhadap perjuangan perempuan dengan memetakan media lokal yang dianggap netral dan independen karena ada beberapa media telah berpihak kepada pemerintah, agar narasi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait izin proyek PLTA Poso Energy di Kabupaten Poso harus bisa terpublikasi ke publik lewat media lokal yang netral dan mendukung.

➤ Cara melibatkan Aktor yang tidak mendukung

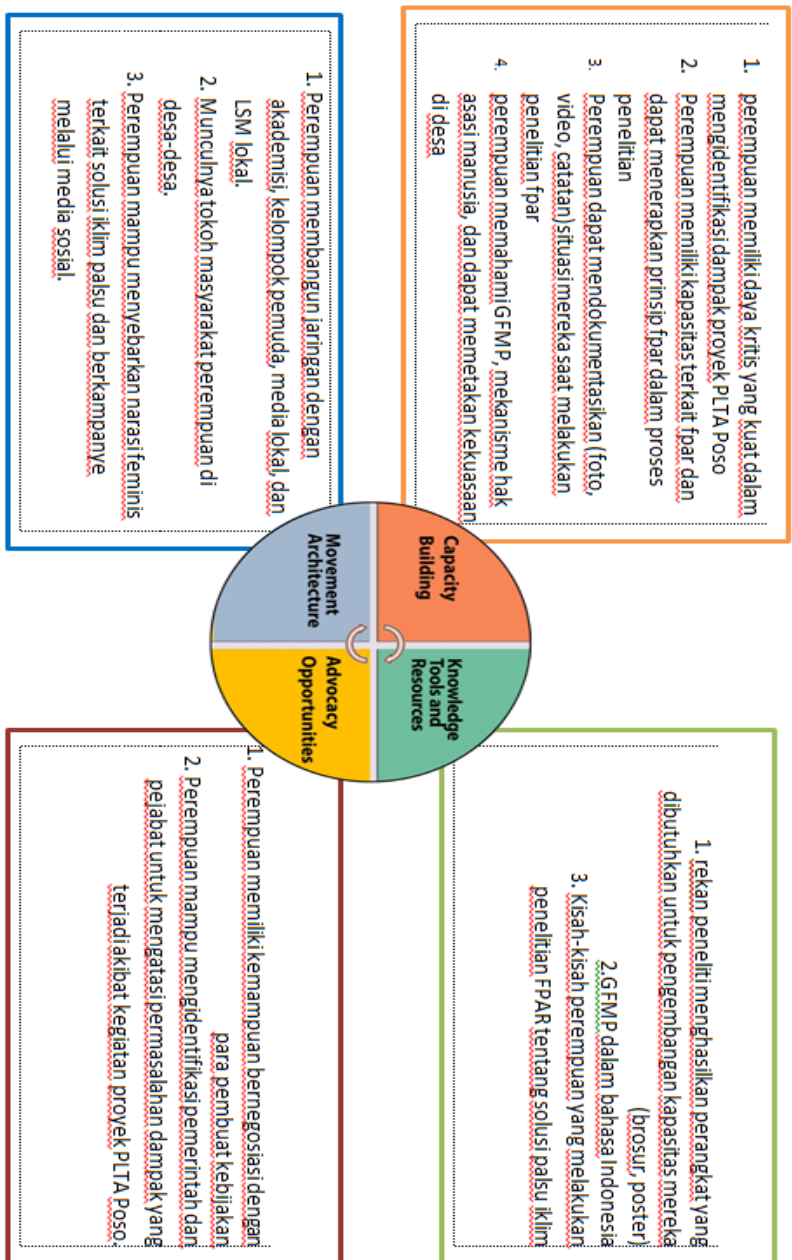
Namun, beberapa aktor menentang tujuan ini. Proyek PLTA Poso Energy tersebut didukung kuat oleh pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga agama kristen lokal. Mereka memiliki aset dan jaringan yang luas.

Bupati Poso adalah perempuan pemimpin daerah di Kabupaten Poso dengan kampung halamannya di Desa Sulewana, sebelumnya ayahnya merupakan mantan Bupati Poso yang menjabat selama 2 periode. Namun menurut perempuan tidak memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak di Desa Sulewana, *“Ibu Bupati tidak memperdulikan kami masyarakat, sudah sering kami warga ke rumahnya untuk bertemu saat dia ada di Sulewana tapi selalu disampaikan beliau sibuk dan akan segera pergi”*. - Perempuan terdampak di Desa Sulewana

Pada pemetaan aktor yang telah dilakukan, terdapat pihak yang berpengaruh namun tidak memihak kepada masyarakat apalagi perempuan. Seperti yang disampaikan oleh perempuan peserta training FPAR dari desa Tampemadoro *“kepala desa kami tidak mau tahu dampak apa yang akan dihadapi masyarakatnya, pemerintah tidak pernah menyampaikan langsung kepada kami soal proyek PLTA apalagi dampak negatifnya ataupun meminta pendapat kami sebagai warga lokal untuk menilai pembangunan proyek, selama ini tidak ada informasi yang kami terima secara resmi dari pemerintah desa”* disampaikan ibu Yufningsih dari desa Tampemadoro. Jika kepala desa mendukung masyarakat dan perempuan maka dampak – dampak yang telah terjadi pada desa Sulewana dapat dicegah terjadi ke Desa Kuku, Tampemadoro, Pandiri yang rencana akan ada perluasan pembangunan PLTA 3 dan 4.

Karena hal ini kami ingin melakukan pertemuan lobi dengan kepala desa untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi perempuan yang akan terdampak dari pembangunan proyek PLTA, serta menyampaikan tuntutan kami tentang solusi palsu iklim.

## Teori Perubahan:



### Jalur Kritis :

Jalur kritis merupakan strategi yang dilakukan selama penelitian FPAR di 5 desa Saojo, Sulewana, Kuku, Tampemadoro, dan Pandiri. Jalur kritis juga menjadi langkah perubahan situasi ketidakadilan perempuan yang ingin di capai.

#### Situasi awal :

1. Sebelumnya isu tentang perubahan iklim dan kaitannya dengan proyek PLTA Poso di kabupaten Poso belum pernah dibahas termasuk di 5 desa paling terdampak : Saojo, Sulewana, Kuku, Tampemadoro, Pandiri
2. Kurangnya pengetahuan dan informasi kepada masyarakat khususnya perempuan tentang proyek PLTA Poso
3. Adanya ketimpangan gender di masyarakat desa terkait keterlibatan peran perempuan di ruang publik.
4. Perempuan di 5 desa paling terdampak belum pernah melakukan analisis bersama tentang dampak perubahan iklim mempengaruhi kehidupan mereka.
5. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya perempuan di wilayah PLTA Poso :
  - a. Pencemaran sungai – hilangnya air bersih
  - b. Kerusakan rumah warga & gereja di Desa Sulewana
  - c. Hilangnya mata pencaharian Petani & Nelayan Sungai
  - d. Adanya rencana perluasan proyek PLTA Poso 3 -4 di desa Tampemadoro & Pandiri
  - e. Tidak adanya informasi serta partisipatif perempuan dalam pembangunan PLTA
  - f. Degradasi budaya, sosial, dan menurunnya ekonomi masyarakat.

| No | Teory Perubahan                                                                                                                                                                                                                 | aktivitas                                | siapa yang terlibat                                                                              | Timeline | kebutuhan riset                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perempuan memiliki pengetahuan tentang FPAR</li><li>2. Para peneliti menerapkan prinsip – prinsip FPAR dalam proses penelitian</li><li>3. Peserta FPAR tahu hak - hak khusus</li></ol> | Training, FGD, pertemuan rutin (Diskusi) | 23 Perempuan dari 5 desa sulewana, saojo, kuku, Tampemad oro, pandiri. CSO lokal, peneliti muda. | 6 bulan  | Notebook, stixnote, karton, spidol, piring plastik, selotip kertas, handphone camera, recording |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                |          |                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|   | perempuan, dan hak asasi manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                |          |                                                           |
| 2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para peserta FPAR memiliki pengetahuan tentang GFMP dan mampu menganalisis kaitannya dengan proyek PLTA Poso Energy</li> <li>2. Perempuan bergerak kolektif dan bersolidaritas membangun jaringan dengan CSO, &amp; media lokal,</li> <li>3. perempuan dapat melakukan pemetaan aktor kuasa</li> <li>4. memahami kebijakan Negara terkait energi baru terbarukan (EBT) seperti proyek PLTA Poso Energy</li> <li>5. Perempuan dapat berpikir kritis tentang bagaimana fundamentalisme dan patriarki mengontrol tubuh perempuan</li> </ol> | Training, pertemuan rutin (diskusi) di desa, FGD, | 23 perempuan, peneliti muda, CSO & media lokal | 10 bulan | Notebook, pena, karton, spidol, stick note, recording, hp |
| 3 | Rekan peneliti membuat alat pengetahuan seperti poster yang bertuliskan penolakan terhadap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Catatan dampak,                                   | Peneliti muda, 5 peneliti pendamping,          | 2 bulan  | Cetak poster                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                               |         |                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|   | solusi iklim palsu PLTA di kabupaten poso                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                               |         |                                               |
| 4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan memiliki pengetahuan melakukan advokasi, mampu mengadvokasi kasus dampak negatif yang mereka hadapi akibat aktivitas PLTA Poso. Berani menyuarakan dampak negatif dari aktivitas PLTA Poso</li> <li>2. Perempuan berani bersuara dan melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah.</li> </ol> | Training, Praktek negosiasi, FGD | Peserta FPAR, rekan peneliti, | 4 bulan | Notebook, stixnote, spidol, karton, recording |

## Prinsip-Prinsip FPAR

Kami menggunakan 9 prinsip – prinsip FPAR dalam setiap langkah penelitian FPAR yang kami lakukan selama 16 bulan. Kami menerapkannya secara bersama – sama dengan peserta FPAR dan menyampaikan ada hal – hal yang perlu dihormati dan dihargai dalam penelitian FPAR serta tujuan penelitian ini adalah terjadi perubahan struktural atau perubahan sistem yang lebih baik bagi perempuan di 5 desa yang paling terdampak dari pembangunan PLTA Poso Energy.

Implementasi FPAR dimulai dengan membangun kepercayaan dengan komunitas, khususnya perempuan akar rumput. Proses ini dimulai dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan mudah diakses. Lokakarya interaktif dimaksudkan untuk menyediakan ruang yang aman bagi perempuan untuk mendiskusikan pengalaman, pengetahuan, dan kekhawatiran mereka. Dengan memperkuat perempuan untuk menciptakan agendanya sendiri, konsep partisipatif menjadi kunci FPAR.

kami menerapkan prinsip - prinsip FPAR dengan konsen, menghargai pendapat dan pengalaman setiap peserta saat pra konsultasi, berbagi pengetahuan bersama seperti "setiap perempuan boleh bercerita tentang pengalaman hidup di desanya sebelum dan setelah PLTA Poso beroperasi. Pengalaman perempuan ternyata sangat banyak khususnya tentang peran - peran mereka dalam kehidupan rumah tangga dan kedekatan mereka dengan sungai dan hutan". Meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi kelangsungan kehidupan mereka dengan membahas dampak - dampak kalau lingkungan itu dirusak seperti terjadi pencemaran sungai apa akibatnya terhadap kesehatan masyarakat, terhadap kehidupan biota sungai dan akibatnya kepada masyarakat ketika mengkonsumsi ikan tersebut khususnya dampak kepada perempuan.

Setelahnya kesadaran perempuan terbangun kami mengajak untuk membangun gerakan kolektif perempuan di 5 desa agar memiliki kekuatan dan tujuan yang sama yakni melindungi apa yang menjadi hak – hak masyarakat, melindungi diri sendiri dan keluarganya. Juga kepercayaan diri perempuan untuk mau terlibat dalam politik untuk bisa menyuarakan persoalan perempuan khususnya soal dampak ketidakadilan gender dari pembangunan PLTA Poso energy.

Metode ini juga mencakup inisiatif pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Akibatnya, perempuan berkembang dari subjek studi pasif menjadi pengambil keputusan aktif.

### **Menghormati suara dan agensi perempuan adalah sentral dalam implementasi FPAR.**

Pendekatan konsultatif menjamin bahwa perempuan adalah peserta aktif, dengan kebebasan untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Dokumentasi komprehensif tentang pembicaraan dan pemikiran perempuan memberikan bukti yang kuat bahwa pendapat mereka didengar dan dihormati.

Metode umpan balik reguler memastikan partisipasi berkelanjutan perempuan dalam proses penelitian dan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi penelitian saat bergerak maju. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya menciptakan

data tetapi juga memungkinkan perempuan untuk mengangkat suara mereka dan mempengaruhi perubahan sosial.

**Pertimbangan etika sangat penting dalam penelitian ini.**

Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip persetujuan informasi dan penerimaan masyarakat, kami memastikan bahwa perempuan berpartisipasi secara sukarela dan tanpa tekanan. Selain itu, kerahasiaan data pribadi dijaga secara ketat untuk menjaga privasi peserta. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru tetapi juga memberdayakan perempuan dengan menjunjung tinggi hak dan suara mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi substansial terhadap hak-hak perempuan dan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip FPAR secara konsisten.

## Lingkup FPAR

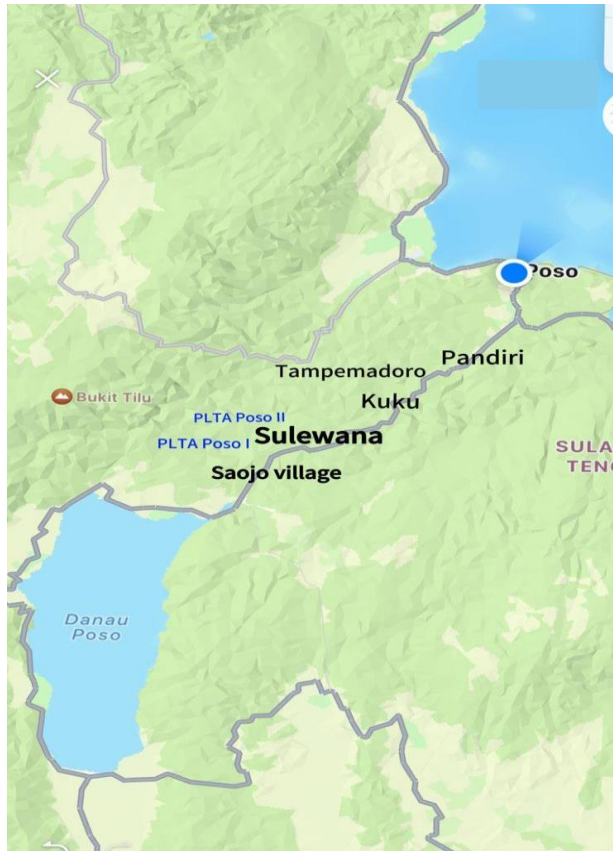
### 3.1 Lingkup Penelitian

Posisi Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini, dan menjadi kota pelabuhan dan perhentian utama di pesisir tengah bagian selatan Teluk Tomini. Kota Poso dilewati oleh Sungai Poso yang mengalir dari Danau Poso kecamatan Pamona Puselemba.



gambar peta wilayah kabupaten poso, sumber foto maps

Wilayah penelitian akan berpusat pada PLTA Poso Energy, mencakup lima desa yang paling terdampak oleh aktivitas PLTA tersebut. Desa-desa tersebut adalah Sulewana, Saojo, Tampemadoro, Kuku, dan Pandiri.



(Gambar peta wilayah lima desa lokasi penelitian FPAR dan lokasi PLTA Poso energy 1 dan 2, sumber foto maps)

Berikut deskripsi dari 5 desa lokasi penelitian FPAR : Desa Sulewana, yang berarti "jantung hutan," mengambil namanya dari tempat tertentu di dalam desa kecil yang disebut Sule "Sule Pembayo." Nama ini mengacu pada jalan raya Trans-Sulawesi, jalan utama pertama yang melewati daerah tersebut. Elemen kedua dari nama tersebut, "wana," berasal dari "tarawana," sebuah situs yang terletak di seberang jembatan luas yang menghubungkan Dusun IV dan Dusun III. Sulewana terletak di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Komunitas ini dikelilingi oleh pohon - pohon besar yang indah dan lebat seperti arti namanya jantung hutan, disana udaranya sangat menyegarkan sepanjang tahun. Sayangnya, pembangunan proyek PLTA Poso Energy memberikan dampak

signifikan yang mengkhawatirkan bagi desa sulewana dan masyarakatnya. Populasi penduduk desa sulewana 2.097 orang (1.019 laki-laki dan 1.078 perempuan). Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah bertani, menanam padi ladang, coklat dan cengkeh serta sayur - sayuran.

Desa Saojo, terletak di kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, dengan populasi penduduk 1.256 orang antara lain 623 laki-laki dan 633 perempuan, mayoritas masyarakat bertani dan menangkap ikan (nelayan) sungai secara tradisional dan sebagian bekerja sebagai penambang pasir sungai. Pembangunan PLTA telah menyebabkan berbagai perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup masyarakat desa saojo, hal ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, akses dan kontrol masyarakat terhadap sungai dan hutan menjadi sulit. dampak gender pada perempuan semakin meningkat akibat hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap hutan dan sungai.

Desa Tampemadoro, terletak di kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dengan luas 3.155 Ha, jumlah penduduk 386 KK terdiri dari 624 laki - laki 531 perempuan. mayoritas mata pencaharian utama masyarakat bertani, pencari hasil hutan bukan kayu (gula aren, saguer, cap tikus, rotan) dan berburu. Nama desa ini juga dikenal dengan sebutan, "Lembah Sibuk," mewakili harapan dan rasa terima kasih orang-orang awal. Tampemadoro, terletak di antara desa Pandiri dan Kuku, diyakini telah dibangun oleh orang-orang dari wilayah pesisir Poso yang menyeberangi sungai poso untuk menciptakan pemukiman baru.

Desa Kuku adalah desa kecil di Kecamatan Pamona Utara yang terkenal dengan buah duriannya yang lezat. Komunitas ini terletak di sepanjang rute Trans Poso-Tentena yang sibuk, memberikan akses cepat ke komunitas terdekat. Desa Kuku, dengan total luas lahan 62,22 kilometer persegi, lebih kecil daripada desa-desa lain di kecamatan tersebut. Desa ini dibedakan oleh lanskapnya yang beragam, yang mencakup bagian-bagian hunian, perkebunan yang luas, dan lahan pertanian yang subur. Sekitar 10 hektar dialokasikan untuk faktor-faktor hunian, sedangkan 226 hektar sisanya digunakan untuk perkebunan yang beragam. Selain itu, komunitas ini memiliki 250 hektar lahan subur yang sebagian besar digunakan untuk pertanian. Desa Kuku adalah desa kecil yang mandiri, mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian. Desa Kuku adalah salah satu desa tertua di Pamona Utara, dengan sejarah dan warisan budaya yang kaya. Jumlah penduduk

621 orang, terdiri dari 335 laki-laki dan 286 perempuan. Meskipun ukurannya kecil, kota ini erat hubungannya, dengan rasa keterhubungan yang kuat di antara masyarakat.

Desa Pandiri terletak di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu permukiman yang direncanakan untuk tumbuh dalam tahap keempat proyek PLTA Poso Energy. Hingga tahun 2021, populasi desa ini berjumlah 1.702 orang, jumlahnya terbagi menjadi 895 laki-laki dan 807 perempuan, dengan jumlah pemukiman sekitar 512 rumah. Sebagian besar penduduk desa menganut agama Kristen. Desa Pandiri terbagi menjadi tiga dusun: Dusun I seluas 78,349 meter persegi, Dusun II seluas 51,483 meter persegi, dan Dusun III seluas 59,324 meter persegi, dengan total luas 189,156 meter persegi. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduknya.<sup>7</sup>

### **3.2 Profil Komunitas**

Studi FPAR ini melibatkan partisipatif 23 perempuan gabungan dari lima desa di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Mayoritas perempuan di lima desa ini mengandalkan sumber daya alam, terutama sungai untuk kebutuhan rumah tangga, juga untuk pertanian dan perikanan. Kehidupan perempuan di desa sangat dekat dengan hutan, sungai, dan tanah. aktivitas sehari – hari mereka pergi berkebun pada pagi hari dan pulang menjelang sore, bahkan ada juga yang tinggal 2-3 hari di kebun bila kebunnya jauh dari desa.

Perempuan dan laki – laki hidup damai berkecukupan dengan sumber daya yang ada di desa, jarak desa mereka dengan Kota Poso tidak begitu jauh paling jauh adalah desa sajo dan sulewana butuh 2 jam dari desa untuk sampai di Kota Poso, terkadang mereka memilih berbelanja di Tentena di banding ke kota karena lokasinya lebih dekat dengan desa disana juga tersedia pasar tradisional yang cukup lengkap mirip seperti di kota lokasinya juga dekat dengan Danau Poso.

Perempuan yang terlibat dalam FPAR adalah masyarakat asli poso, suku pamona, bahasa yang mereka gunakan bahasa pamona di campur dengan bahasa

---

<sup>7</sup> Data base pemdes tentang profil desa pandiri, desa kuku, desa sulewana, desa sajo dan tampemadoro tahun 2021

Indonesia, mereka memiliki banyak budaya, salah satunya budaya yang berkaitan dengan sungai yaitu Mosango. Mosango adalah budaya yang diwariskan oleh tetua - tetua suku Pamona tentang menangkap ikan di sungai dengan menggunakan keranjang bambu atau di tombak, tradisi ini sering dilakukan setiap tahun. Menjaga sungai adalah suatu keharusan karena sungai memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia.

Kota Poso pernah terjadi kerusuhan yang membuat trauma semua orang, pada tahun 1998 – 2000 terjadi pertumpahan darah yang dipicu oleh perkelahian anak muda yang berbeda agama Islam – Kristen. Menimbulkan korban dari pihak Kristen, sehingga memicu konflik horizontal.

Belum cukup waktu untuk menyembuhkan luka mendalam masyarakat karena konflik yang menyisakan trauma berat bagi masyarakat Poso. Pada tahun 2003 terdengar kabar bahwa akan ada perusahaan pembangkit listrik tenaga air PLTA yang akan beroperasi. Dengan keadaan psikologis masyarakat yang masih belum pulih serta ekonomi masyarakat yang juga belum stabil pasca konflik. Mereka harus diperhadapkan dengan pembangunan proyek PLTA, yang saat itu sudah melakukan pembebasan lahan.

Komunitas perempuan dari lima desa memiliki sejarah dan pengetahuan soal lingkungan di tempat tinggal mereka, karena mereka lahir dan hidup puluhan tahun di desanya, ketika ada perubahan pada lingkungannya mereka pasti merasakan dampak, karena itu kebijakan iklim yang salah akan berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya perempuan.

### 3.3 Pertanyaan Penelitian

**Tujuan Dampak:** Perempuan di lima desa menolak proyek hidroelektrik Poso Energy sebagai solusi perubahan iklim yang salah.

**Pertanyaan penelitian utama:** Apa dampak gender dari proyek PLTA Poso terhadap perempuan?

**Dampak terhadap mata pencaharian perempuan:**

- Bagaimana proyek hidroelektrik telah mengubah kehidupan sehari-hari dan rutinitas perempuan dalam komunitas?

- Perubahan spesifik apa yang telah dialami perempuan dalam tanggung jawab rumah tangga dan beban kerja mereka akibat proyek PLTA?

**Akses terhadap sumber daya alam:**

- Bagaimana proyek ini telah berdampak pada akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alam, seperti tanah dan air, dan apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka?
- Apakah ada perubahan signifikan dalam kemampuan perempuan untuk menopang rumah tangga mereka akibat perubahan ketersediaan dan kontrol sumber daya?

**Partisipasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan:**

- Bagaimana keterlibatan perempuan dalam proses konsultasi selama pengembangan proyek hidroelektrik?
- Langkah spesifik apa yang dapat diambil untuk memastikan bahwa perempuan berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek di masa depan?

**Keadilan lingkungan berbasis gender:**

- Mengingat hubungan mereka yang kuat dengan alam, bagaimana perempuan menghadapi ketidakadilan lingkungan sebagai akibat dari pengembangan hidroelektrik?

**Ketahanan komunitas:**

- Bagaimana perempuan berkontribusi pada ketahanan komunitas dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh proyek hidroelektrik?
- Cara apa yang dapat mendukung dan diakui peran perempuan dalam ketahanan komunitas?

**Pengetahuan dan perspektif:**

- Bagaimana pemahaman perempuan tentang narasi pemerintah tentang proyek hidroelektrik sebagai opsi energi terbarukan, dan bagaimana kaitannya dengan pengalaman mereka sendiri?
- Apa hubungan antara PLTA Poso dan krisis iklim?

**Dokumen kebijakan:**

- Apa hubungan antara kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pengembangan proyek hidroelektrik di Poso, dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi desain, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat?

- Peraturan spesifik apa di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek PLTA Poso Energy? Seberapa efektif peraturan ini dalam mengurangi dampak negatif yang potensial?

### 3.4 Pengumpulan Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi ini akan membutuhkan data berikut:

1. **Situasi perempuan sebelum dan setelah PT Poso Energy muncul di wilayah Kabupaten Poso.** Data ini akan berfungsi sebagai dasar perbandingan untuk memahami perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan perempuan akibat proyek hidroelektrik. Ini akan berguna untuk mengidentifikasi dampak spesifik proyek terhadap perempuan.
2. **Informasi tentang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan tingkat desa untuk proyek PT Poso Energy.** Data ini akan menunjukkan seberapa banyak perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan apakah sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Ini juga akan menyoroti hambatan atau tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam proses ini.
3. **Studi tentang desain perencanaan spasial dan regional.** Dengan mengevaluasi rencana ini, peneliti dapat lebih memahami bagaimana proyek hidroelektrik diintegrasikan ke dalam pembangunan umum wilayah tersebut dan apakah kebutuhan masyarakat setempat, terutama perempuan, telah dipertimbangkan selama tahap perencanaan.
4. **Informasi tentang apa yang diketahui oleh perempuan tentang proyek PT Poso Energy.** Informasi ini akan membantu peneliti menentukan tingkat kesadaran di antara perempuan tentang studi tersebut, persepsi mereka tentang dampaknya, dan sumber informasi yang mereka gunakan.
5. **Peran perempuan di wilayah di mana proyek PT Poso Energy sedang dikembangkan.** Data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran perempuan dalam komunitas sebelum dan setelah proyek, termasuk kegiatan ekonomi mereka, jaringan sosial, dan praktik budaya mereka.

## **Jangka Waktu Penelitian**

Proyek penelitian KFMS direncanakan berlangsung selama 16 bulan, dari September 2023 hingga Desember 2024. Tahap persiapan awal telah berhasil diselesaikan antara September dan Desember 2023, membuka jalan bagi kegiatan penelitian utama.

## **Etika dan Strategi Keselamatan**

Penelitian FPAR akan berlangsung di lima desa: Saojo, Sulewana, Kuku, Tampemadoro, dan Pandiri. Sebagian besar penduduknya adalah orang Pamona, beragama Kristen. Hari Sabtu dan Minggu secara tradisional dikhususkan untuk kegiatan keagamaan dalam komunitas atau gereja mereka. Mengingat banyak perempuan adalah petani, hari kerja mereka sering dipenuhi dengan tugas pertanian. Oleh karena itu, kegiatan penelitian harus diatur dan dilakukan pada waktu yang disepakati bersama.

## **3.5 Keterbatasan Penelitian**

Kota Poso, kota yang beragam dengan sejarah konflik agama, telah mengalami kehilangan dan trauma yang besar akibat kekerasan sebelumnya. Sejarah yang sensitif ini memerlukan kehati-hatian saat melakukan penelitian di wilayah tersebut. Untuk menghindari peningkatan ketegangan atau mengungkit kembali trauma masa lalu, para peneliti memilih untuk tidak memasukkan diskusi yang panjang tentang masalah keagamaan dalam studi FPAR mereka.

## Bagian 2: Profil Proyek

### Profil Proyek

Proyek PLTA Poso merupakan proyek energi terbarukan yang di bangun di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Proyek PLTA Poso Energy memiliki kapasitas terpasang total sebesar 515 megawatt. Oleh karena itu, dapat menghasilkan daya hingga 515 megawatt pada produksi puncak. Kapasitas ini terdiri dari banyak pembangkit listrik tenaga air yang terletak di sepanjang Sungai Poso. Kapasitas spesifik setiap pembangkit listrik dalam proyek dapat berbeda, tetapi kapasitas agregat keseluruhan dari semua unit adalah 515 MW. Informasi ini penting untuk menilai dampak potensial proyek terhadap pasokan energi di wilayah tersebut.

Proyek PLTA Poso I dan II terletak di sungai poso di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Wilayah ini dikenal dengan medan yang sulit dan sumber daya air yang kaya, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pembangkit listrik tenaga air. Proyek ini secara khusus diposisikan di bagian atas sungai Poso, di mana aliran airnya kuat dan berkelanjutan, memastikan pasokan energi yang stabil. Desa Sulewana kemungkinan dipilih sebagai lokasi proyek karena ketersediaan lahan untuk pengembangan pembangkit listrik dan kedekatannya dengan sungai.



Proyek PLTA Poso 2, Sumber foto Posoline

Proyek ini dimiliki oleh PT Poso Energy anak perusahaan dari KALLA GROUP yang dimiliki oleh Yusuf Kalla mantan wakil presiden 2 periode. Daya yang dihasilkan dari proyek tersebut dijual ke PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian jual beli listrik. PT Poso Energy memulai operasinya di Kabupaten Poso pada tahun 2003, melakukan akuisisi lahan di Desa Sulewana dan Saojo. PLTA mendapatkan izin dari pemerintah daerah pada bulan november tahun 2004 hal ini disampaikan oleh direktur Kalla Group Hj. Jusuf Kalla dalam wawancara saat meninjau langsung pembangunan proyek PT.Poso Energy. Sebagai anak perusahaan Kalla Group, PT Poso Energy didirikan di bawah kepemilikan Jusuf Kalla, yang secara bersamaan memegang posisi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia pada tahun 2003. Di seluruh Indonesia, Kalla Group memiliki total portofolio lebih dari 1.500 MW.

PT. Bukaka Teknik Utama adalah kontraktor utama untuk proyek ini. Khususnya, semua pekerja dan spesialis yang terlibat dalam perencanaan, desain, dan pembangunan PLTA Poso adalah orang Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi membuka pabrik pada tanggal 25 Februari 2022, dengan aktivasi sirine simbolis dan penandatanganan plakat. pada acara tersebut presiden meminta kepada PT PLN untuk menyederhanakan proses negosiasi dan perizinan sehingga pembangunan PLTA berikutnya tidak terlalu lama. dalam acara peresmian tersebut founder Kalla Group Jusuf Kalla mengatakan, PLTA Poso menggunakan sistem aliran air langsung dari sungai (run off river) yang tidak mempunyai bendungan sebagai penampung air, hanya memanfaatkan air yang berjalan saja. Sejak awal pembangunan PLTA Poso 1 dan 2, telah dilakukan pembangunan bendungan di 2 titik sungai Poso. Bendungan Poso 2, misalnya, dibangun di kawasan wisata air terjun yang terletak di Desa Sulewana, aktivitas konstruksi ini telah mengubah bentang alam secara signifikan, dengan melakukan pengerukan di tepi sungai dan perbukitan di sekitarnya serta peledakan batuan. Begitu juga dengan pembangunan Bendungan PLTA Poso 1 yang juga membangun sebuah Bendungan, bisa terlihat jelas dari Desa Sulewana. Selanjutnya bapak jusuf kalla menyampaikan penyebaran pasokan listrik PLTA Poso disebarkan ke empat provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Selatan, Tenggara dan Sulawesi Barat. Selain untuk mensejahterakan

masyarakat Poso, salah satu alasan pembangunan PLTA Poso adalah karena merupakan sumber energi ramah lingkungan.<sup>8</sup>

Baru-baru ini, PowerChina Chengdu Institute menandatangani kontrak untuk desain pondasi proyek Bendungan PLTA Poso-3 di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. PLTA Poso 3 terletak di sungai Poso di hilir Danau Poso Sulawesi Tengah, Indonesia Timur. Rencana Perluasan PLTA terus di lakukan hingga saat ini, hal ini juga menjadi perhatian dalam penelitian yang nantinya menjadi penilaian apakah perluasan PLTA benar - benar di inginkan oleh masyarakat Poso atau hanya kepentingan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>8</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-joko-widodo-resmikan-plta-di-kabupaten-poso>

## Bagian 3: Temuan dan Analisis FPAR

### Temuan Utama

FPAR, yang dilakukan bersama dengan perempuan di lima desa, telah mengidentifikasi masalah hak asasi manusia yang timbul dari pembangunan PLTA Poso oleh PT Poso Energy. Di antaranya adalah hak ekonomi karena banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan mereka, terutama akibat banjir yang melanda lahan pertanian mereka dan aktivitas pelebaran sungai/blasting di pengerukan dasar sungai yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat lagi membuat pagar sogili/waya masapi untuk menangkap ikan di sungai. Menangkap ikan menggunakan waya masapi merupakan warisan budaya yang harusnya dapat terus dilestarikan oleh masyarakat yang tinggal di dekat sungai.



Pelebaran sungai mengakibatkan pagar sogili masyarakat tenggelam dan rusak pelebaran di lakukan bersama dengan pembuatan jalan baru di pinggir sungai dari PLTA Poso 1 menuju Kota Tentena.

(Sumber foto SP Sintuwu Raya Poso tahun 2021)

Pencemaran air sungai sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat setempat sebelumnya mereka bebas memanfaatkan sungai sekarang muncul kekhawatiran akan bahaya kesehatan jika mereka mengkonsumsi. Selain itu tidak hanya pencemaran air, aktivitas transportasi proyek menyebabkan polusi suara yang juga memiliki resiko kesehatan bagi masyarakat setempat

Keberadaan PLTA Poso telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di 5 desa di sekitar proyek tersebut. Di Desa Sulewana, misalnya, banyak rumah mengalami kerusakan serius, mulai dari retakan dinding hingga penurunan pondasi. Kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas peledakan batuan di sungai yang dilakukan oleh perusahaan PLTA. Ledakan tersebut telah menyebabkan pendangkalan sungai, peningkatan drastis debit air. Proyek PLTA Poso Energy, yang dimaksudkan sebagai alternatif energi hijau, telah memicu masalah lingkungan.

Pengembangan bendungan telah mengakibatkan degradasi habitat yang besar, mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem. Gejolak ini telah memiliki dampak yang mendalam bagi biota sungai.

Selain itu, proyek ini telah merampas lahan perkebunan masyarakat di awal mulai pembangunan, mengubah mata pencaharian tradisional, dan merusak situs warisan budaya, sehingga memperburuk dampak lingkungannya. Beberapa kritikus mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca dari proyek tersebut, terutama dari metana waduk, dapat mengalahkan keunggulan potensialnya dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kelayakan keseluruhan proyek dan perannya dalam menyelesaikan krisis lingkungan global.

PLTA Poso adalah investasi yang beroperasi di bidang energi dikelola oleh swasta, ini menimbulkan ketakutan akan terjadi privatisasi dalam industri listrik ketika perusahaan swasta mengoperasikan stasiun pembangkit listrik tenaga air berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik (PPJB). Pendekatan privatisasi ini telah banyak mendapat perhatian dan perdebatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan para pendukungnya berargumen tentang manfaatnya dan para kritikus menyuarakan kekhawatiran tentang potensi bahayanya. Memprivatisasi industri energi, termasuk pembangkit listrik tenaga air, telah menjadi topik sensitif di banyak negara. Intervensi swasta akan memiliki konsekuensi negatif yang signifikan, terutama dalam hal kekuatan pasar, akuntabilitas publik, korupsi, dan dampak lingkungan.

Salah satu kekhawatiran utama privatisasi sektor energi adalah bahwa hal itu dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini dapat membentuk monopoli atau oligopoli,

membatasi persaingan dan membatasi pilihan konsumen. Ketika bisnis mengendalikan pasar, mereka dapat menetapkan harga dan menentukan ketentuan tanpa takut akan persaingan yang serius. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan tagihan listrik bagi pelanggan dan lebih sedikit insentif untuk inovasi dan efisiensi.

Inisiatif energi terbarukan dan bersih sering kali disebut-sebut sebagai cara untuk mengurangi krisis pemanasan global. Namun, hal itu mengabaikan potensi dampak pembangunan proyek. Selain itu, pemerintah Indonesia terus memandang masyarakat sebagai entitas yang homogen, mengabaikan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan, di sisi lain, seringkali dikucilkan dari proses konsultasi, meskipun mereka menderita konsekuensi yang lebih serius dan mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian universitas School of Environment of the Washington State University in Vancouver (Sekolah Lingkungan Hidup Washington State University di Vancouver), yang mengatakan bahwa bendungan menghasilkan 25 % metana berkontribusi terhadap pemanasan global. Metana yang dihasilkan dari dasar bendungan, dimana tempat kadar oksigen rendah, bakteri mengurai bahan organik, pohon dan rumput yang terbawa oleh saluran air dan metana tersebut menjadi CO<sub>2</sub>, sisanya yang muncul dipermukaan akan menghasilkan gelembung, dimana gelembung tersebut yang menghasilkan emisi.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Poso bukti bahwa krisis iklim benar terjadi di bagian perubahan cuaca yang ekstrim telah dirasakan nyata oleh masyarakat di tahun 2022 – 2023 terjadi musim panas yang cukup panjang berbulan – bulan lamanya dan tidak turun hujan, fenomena ini baru kali ini terjadi di Desa Sulewana dan desa lainnya informasi dari perempuan petani yang telah gagal panen, *“sekarang menanam tidak bisa lagi diprediksi karena perubahan iklim yang terjadi”* disampaikan perempuan desa kuku pada pelatihan advokasi. Banyak yang gagal panen akibat cuaca panas berkepanjangan. Bukan hanya di Poso Sulawesi Tengah tapi di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan juga banyak petani yang gagal panen dan mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

---

<sup>9</sup> hasil penelitian Sekolah Lingkungan Hidup Washington State University di Vancouver tentang iklim dan energi bersih

Cuaca panas dan tidak pernah hujan menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan debit air danau berkurang sehingga air sungai yang mengalir mengecil akibatnya pasokan listrik yang dihasilkan tidak optimal. Perusahaan mengakali dengan melakukan praktik modifikasi cuaca dengan melakukan penyemaian garam di awan untuk mempercepat terjadinya hujan, memodifikasi cuaca agar menghasilkan hujan dilakukan demi menjaga keamanan pasokan air untuk kepentingan perusahaan, namun hal ini bisa berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Di awal masuknya proyek PLTA masyarakat khususnya perempuan tidak dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip FPIC yang mewajibkan pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal termasuk perempuan untuk tahu tentang rencana proyek yang akan di bangun di desanya. Perempuan tidak memiliki informasi akurat tentang proyek PLTA Poso, mereka hanya tahu bahwa PLTA akan di bangun di desa, dan masyarakat akan mendapat listrik gratis serta akan di buka lowongan pekerjaan yang akan mengutamakan penduduk lokal.

Soal listrik gratis juga tidak tepat, masyarakat desa Sulewana dan sajo yang termasuk dalam lokasi pembangunan PLTA Poso 1 - 2 masih membayar listrik setiap bulannya, hanya masyarakat Sulewana mendapatkan subsidi listrik untuk pemakaian 900 VA mendapatkan subsidi 100 ribu rupiah/bulan sisa beban bayar ditanggung oleh masyarakat, pemakaian di bawah 900 VA mendapatkan subsidi penuh. *“saya dulu membayar listrik 45 -50 ribu / bulan dengan beban listrik 450 VA kami mendapatkan subsidi 50 ribu rupiah/bulan sekarang kami tidak membayar listrik lagi”*. disampaikan oleh malvin baduge diskusi kampung desa Sulewana.

Sedangkan lowongan kerja yang katanya mengutamakan masyarakat setempat hanyalah sebuah janji, banyak masyarakat yang melamar pekerjaan di perusahaan namun terkendala dengan persyaratan seperti harus memiliki ijazah, memiliki pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat dan lain-lain, pada akhirnya banyak masyarakat tidak bisa memenuhi persyaratan – persyaratan tersebut dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Adapun yang tetap diterima hanya sebagai buruh bangunan atau petugas kebersihan yang melakukan pekerjaan kasar dengan upah yang kecil. Mereka yang bekerja juga hanya paruh waktu atau pekerja dengan perjanjian kontrak, yang setiap 1 tahun selalu di evaluasi, sedangkan buruh bangunan akan di berhentikan ketika proyek bangunan telah selesai.

## **Dampak Aktivitas PLTA Poso Energy terhadap kehidupan perempuan**

Realitas persoalan yang dihadapi perempuan di 5 komunitas yaitu Desa Saojo, Kuku, Sulewana, Tampemadoro dan Pandiri berdasarkan pengetahuan perempuan Poso yang menghadapi dampak negatif aktivitas proyek PT Poso Energy, antara lain :

### **1. Perempuan Kehilangan Mata Pencarian – ekonomi**

Uji coba pintu air bendungan PLTA Poso di awal tahun 2020, menyebabkan kenaikan permukaan air danau dan buangan air dari bendungan yang deras ke bagian hilir sungai. Hal ini berdampak pada 2 desa yang berbeda, Desa Meko yang berada di dekat danau yang berdampak naiknya volume air danau juga Desa Pandiri yang berada di bagian bawah terdampak buangan air yang deras. Dampaknya adalah pertanian sawah mereka terendam air.

sepanjang Januari 2020 hingga awal Januari 2021 petani di Desa Pandiri mengalami 3 kali gagal panen. Untuk melakukan penanaman bibit para petani meminjam hutang untuk biaya produksi, satu kepala keluarga meminjam uang sekitar 15 – 30 juta 5 juta rupiah untuk modal per satu hektar, karena terjadi gagal panen membuat petani kesulitan untuk melunasi hutang pinjaman. Petani di Pandiri harus mencari penghasilan alternatif untuk melunasi hutangnya akhirnya petani ada yang terpaksa beralih menjadi buruh dan ada yang mencari rotan di hutan.

Di Desa Sulewana perempuan bekerja sebagai petani mereka menanam padi di ladang juga menanam cengkeh, coklat dan sayur - sayuran. sedangkan Desa Saojo mayoritas adalah Nelayan sungai dan Petani.

Menanam dan menangkap ikan di sungai adalah sumber pendapatan mereka. Perempuan menangkap ikan di sungai dengan menggunakan pagar sogili/waya masapi, pagar yang terbuat dari bambu di pasang di tengah sungai berbentuk huruf V, di atas bambu mereka membuat tempat istirahat sambil menunggu ikan yang terjat. Hasil menangkap ikan sogili lumayan menguntungkan, harga ikan sogili berkisar 90 – 100 ribu rupiah per kg. ikan ini kaya akan protein, lemak sehat (termasuk omega-3), vitamin (A, D, B12), dan mineral (zat besi, fosfor). Kandungan nutrisinya mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak anak, serta kesehatan ibu hamil dan menyusui.



Gambar pagar sogili/ waya masapi, sumber foto mosintuwu.

Pada tahun 2016 – 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Poso bersama PT. Poso Energy melakukan penataan sungai Poso sepanjang 12,8 km yang bertujuan sebagai penanganan banjir akibat luapan danau poso, penataan jalur sogili di tengah sungai (pengerukan dasar sungai) untuk membantu pelestarian biota endemik tersebut, meningkatkan potensi Danau Poso sebagai objek wisata, namun 3 hal yang disebutkan tadi bukan tujuan utama namun hanya sebagai tambahan positif dari rencana utamanya yaitu meningkatkan keandalan pembangkit listrik PLTA kaskade sungai Poso, sebagai persyaratan teknis pemenuhan kapasitas daya untuk beban puncak pembangkit PLTA Poso Energy.

Aktivitas pengerukan sungai Poso oleh PLTA Poso Energy dengan tujuan meningkatkan debit air bagi kepentingan operasional PLTA Poso Energy, kegiatan tersebut akan mengeluarkan 2,5 juta meter kubik material pasir

dan lumpur dari hulu sungai akibatnya ini akan berpotensi rusaknya habitat biota endemik ikan sogili, ikan mas, dan ikan mujair yang hidup di danau dan sungai Poso.<sup>10</sup> Akibatnya menangkap ikan bertambah sulit bagi masyarakat khususnya perempuan nelayan.

Penanganan banjir yang disampaikan dalam tujuan rencana penataan sungai Poso tidak benar – benar terjadi. selama ini masyarakat yang tinggal di sekitar danau dan sungai yang memiliki lahan pertanian dan menanam padi di sawah yang tidak jauh dari danau, perempuan mengatakan bahwa tidak pernah terjadi banjir, bahkan saat musim hujan, air danau tidak pernah meluap sampai menimbulkan banjir berkepanjangan. Terjadinya banjir ini dimulai pada tahun 2020. Saat PLTA Poso Energy melakukan uji coba pintu air bendungan PLTA Poso 1 yang mengakibatkan 426 hektare areal persawahan yang tersebar di 16 desa di kecamatan Pamona Puselemba, Pamona Barat, Pamona Selatan dan Pamona Tenggara menjadi terendam, banyak petani yang tidak dapat lagi menanam di sawahnya mereka mengalami kerugian.<sup>11</sup>

## **2. Perempuan Kehilangan Warisan Budaya**

Perempuan yang ada di Desa Saojo dan Desa Sulewana kehilangan tradisi menangkap ikan di tepi danau tradisi yang sering disebut Monyilo, Waya Masapi, Mosango. mereka juga telah kehilangan wilayah ulayat kompodongi yang oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat tradisi menombak ikan akibat wilayah kompodongi tersebut dijadikan lokasi timbun material dari aktivitas pengerukan. akibatnya perempuan tidak dapat menerapkan pengetahuannya ke anak cucunya karena tradisi tersebut tidak dapat lagi dilakukan.

## **3. Perempuan Kehilangan Sumber Air Bersih**

Selain itu, air sungai tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari – hari perempuan dan masyarakat, karena telah dikuasai pengelolaan dan pemanfaatannya oleh PT Poso Energy, air

---

<sup>10</sup> <https://mongabay.co.id/2018/05/14/tolak-pengerukan-warga-sarankan-jaga-dan-pulihkan-hutan-sekitar-danau-poso-bagian-2/>

<sup>11</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/uji-coba-pintu-air-plta-ratusan-hektare-sawah-di-sekitar-danau-poso-terendam-/5650600.html>

sungai juga telah tercemar oleh limbah aktivitas perusahaan. Kepala Dusun III saat diskusi kampung menyampaikan “dulu kami mengkonsumsi air sungai, tapi sekarang kami tidak mau lagi konsumsi air sungai karena ada bendungan di atas”. Akibat perubahan yang terjadi beban perempuan bertambah mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan air bersih, seperti membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan minum. sumber air bersih yang tercemar menambah beban fisik dan psikologi kepada perempuan karena peran gender nya sebagai istri.

#### **4. Perempuan Kehilangan Tanah**

Proyek PLTA Poso Energy telah melakukan pembebasan lahan secara masif yang di peruntukan untuk lokasi pembangunan PLTA, pembebasan lahan telah merampas sumber hidup perempuan, tanah perkebunan telah dikuasai dan dialih fungsikan menjadi area pembangunan proyek PLTA Poso.

Perempuan terpaksa menyerahkan lahannya bila tidak menjual akan dianggap melawan kebijakan negara dan menghalangi pembangunan untuk kepentingan umum karena proyek ini didukung oleh pemerintah daerah. Pembebasan lahan ini dilakukan oleh pihak – pihak yang diduga perpanjangan tangan perusahaan mereka menyebutnya calo – calo tanah. Harga tanah yang dibayar pada waktu itu sekitar 1000 – 5000 rupiah/ meter harga yang sangat murah.

Hilangnya tanah perkebunan milik masyarakat akibat pembebasan lahan oleh perusahaan telah membawa dampak besar terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di desa. Menurut perempuan dari lima desa yang terdampak, proses pembebasan lahan sejak awal pembangunan proyek PLTA Poso Energy tidak pernah diinformasikan kepada mereka. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam rapat, tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi, dan tidak diminta pendapatnya terkait proyek. Kurangnya pelibatan ini menunjukkan bahwa tidak ada partisipasi yang bermakna dari masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan keputusan. tidak adanya pelibatan perempuan bukti bahwa pengetahuan perempuan tidak diakui dan

membuat mereka menjadi lebih rentan mengalami dampak dari pembangunan proyek PLTA.

## 5. Gangguan Kesehatan Perempuan

Aktivitas PLTA Poso Energy menggunakan peledak untuk menghancurkan batu - batu besar yang ada di sungai dan pengerukan sungai mengakibatkan perubahan bentang alam. aktivitas ini menimbulkan suara ledakan yang kuat. suara ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat khususnya perempuan hamil dan lansia. hal ini akan berpotensi pada kesehatan jantung perempuan yang tinggal di sekitar DAS Poso.

Terjadi pencemaran air sungai, pembangunan bendungan PLTA menyebabkan sungai tercemar air sungai keruh akibat limbah semen yang mengalir ke sungai, di tambah pembuangan minyak dari aktivitas pembangunan bendungan. “pinggiran sungai terlihat keruh, dan berminyak waktu saya ingin turun mencuci pakaian di sungai” disampaikan oleh Ibu Malvin Baduge dari Desa Sulewana ketika pertemuan diskusi di Desa. Air yang tercemar dapat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi bagi perempuan kebutuhan khusus pada perempuan yaitu berkaitan dengan siklus menstruasi perempuan membutuhkan air bersih lebih banyak setiap bulan



Tempat mencuci masyarakat, air sungai terlihat keruh dan berminyak lokasi pinggiran sungai desa sulewana, sumber KFMS

## **Tidak adanya keterlibatan perempuan selama konsultasi pembangunan proyek**

Pada pertanyaan penelitian kami ingin mengetahui sejauh mana perempuan diajak berkonsultasi selama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air, dan bagaimana kurangnya konsultasi tersebut berdampak pada kehidupan mereka.

Perempuan di lima komunitas Desa Saojo, Sulewana, Kuku, Tampemadoro, Pandiri yang mengalami dampak negatif aktivitas proyek PLTA Poso Energy menceritakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan, mereka tidak mendapatkan informasi jelas dan lengkap dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek PLTA Poso Energy. Perempuan tidak mengetahui potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat proyek, yang semestinya diberitahukan lebih awal oleh perusahaan dan pemerintah sebelum proyek berjalan.

Perempuan tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai persyaratan dan biaya pembebasan lahan dan informasi potensi kehilangan akses sumber ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Bahkan perempuan yang dijanjikan keluarga atau anaknya akan mendapatkan peluang pekerjaan di proyek, ternyata tidak terpenuhi dan hanya janji kosong. Kalaupun ada yang bekerja, akan ditempatkan sebagai pekerja kasar atau dibebankan persyaratan yang hanya diperuntukan untuk kriteria pekerja profesional dan pendidikan tinggi yang masyarakat tidak bisa mendapatkan atau mengakses pekerjaan tersebut.

“selama ini kami tidak mendapatkan informasi jelas terkait perusahaan PLTA Poso ini, kami hanya tahu perusahaan ini akan di bangun di desa, dan akan membeli lahan - lahan masyarakat, masyarakat akan mendapatkan listrik gratis dan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat” disampaikan ibu Malvin Baduge pertemuan diskusi desa Sulewana

Selama ini perempuan tidak pernah diakui pengetahuan dan suaranya. perempuan dianggap tidak memiliki pengetahuan, seringkali kehadiran perempuan hadir di rapat desa hanya untuk mengurus konsumsi rapat.

Awalnya pandangan perempuan terhadap proyek PLTA ini adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi perempuan. Bahwa masyarakat desa Sulewana dijanjikan listrik gratis, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. menurut mereka kehadiran proyek ini dapat membantu perekonomian keluarga ketika anak ataupun suami mereka bekerja di perusahaan informasi ini di dapat dari orang lain yang menyebarkan janji – janji manis di desa agar masyarakat menerima kehadiran proyek dan tidak mencari tahu lagi lebih banyak soal proyek.

Namun seiring waktu pembangunan PLTA memberikan dampak negatif bagi perempuan, janji perusahaan tentang listrik, lapangan kerja semua tidak sesuai harapan. dan ketika Perempuan menyampaikan situasi dan persoalan yang mereka hadapi ke pemerintah desa namun tidak mendapatkan respon, pemerintah malah menyalahkan masyarakat kenapa mau menjual tanahnya akhirnya perempuan merasa bahwa pemerintah tidak memperdulikan mereka.

Hal yang sama juga dialami oleh perempuan Desa Saojo juga menyampaikan pendapatnya bahwa masyarakat akan mendapatkan listrik gratis dan pekerjaan untuk masyarakat lokal jika mereka mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan PLTA Poso, namun listrik gratis yang dijanjikan tersebut tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Saojo karena tidak ada perjanjian tertulis antara pihak perusahaan dan masyarakat atau pemerintah desa Saojo. selain itu perempuan dengan tegas menyampaikan bahwa sungai mereka yang selama ini menjadi sumber kehidupan nya telah dikuasai dan dikontrol oleh perusahaan.

“Saya sekarang takut menyeberang sungai, karena sungai kami sudah sangat dalam akibat pengerukan dasar sungai yang dilakukan perusahaan beberapa tahun yang lalu, saya tidak bisa lagi pergi berkebun di seberang sungai, padahal di sana saya memiliki kebun yang masih produktif. Dulu kami menyebrang sungai bisa dengan berjalan kaki jika air sungai surut, atau naik perahu kecil jika air sungai naik, biasanya kami memasang patok untuk mengikat perahu di pinggiran seberang sungai, tapi sekarang kami dilarang perusahaan memasang patok karena tanah di pinggiran sungai itu sudah dibeli oleh perusahaan, jadi kami sudah tidak punya lokasi untuk tambatan perahu”.

“dulu kami dijanjikan akan mendapatkan listrik gratis di desa Saojo dan perusahaan akan membuka lapangan kerja, tapi sampai sekarang listrik masih

tetap kami bayar, pekerjaan juga sangat sulit diakses, anak saya berkali - kali coba mendaftar security tapi tidak pernah diterima, terakhir nanti ada masalah waktu pembebasan lahan di pinggir sungai milik saya yang saya tidak kasih izin jual kemudian pihak perusahaan datang ke rumah saya bernegosiasi dan mereka mengatakan akan memperkerjakan anak saya di perusahaan sebagai security” disampaikan oleh Ester Pasolawa di pertemuan diskusi desa Saojo.

## **Pelanggaran HAM**

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh perempuan di lima desa paling terdampak pembangunan proyek PLTA dapat disimpulkan telah terjadi banyak pengabaian oleh pemerintah serta pelanggaran hak asasi, pemerintah dan perusahaan dalam proses awal pembangunan hingga saat ini

Menurut Konstitusi Indonesia, Konstitusi 1945, beberapa pelanggaran hak asasi perempuan yang disorot selama pelaksanaan proyek PLTA Poso antara lain: Hak atas informasi: Masyarakat di sekitar proyek, khususnya perempuan, tidak diinformasikan secara memadai tentang perencanaannya, pelaksanaannya, dan risiko potensinya. Sosialisasinya tidak lebih dari tipuan dengan janji-janji kosong, seperti pekerjaan, yang belum diimplementasikan.

Hak untuk bekerja dan kehidupan layak : Dampak negatif dari pelaksanaan proyek menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, mempengaruhi ekonomi rumah tangga. Akibatnya, banyak petani dan nelayan perempuan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya mereka kerjakan.

Hak atas perumahan: Beberapa orang mengeluhkan bahwa rumah mereka telah dirusak. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup perempuan. Karena mereka selalu khawatir bahwa operasi PLTA Poso akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada tempat tinggal mereka.

Hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik dan sehat: PLTA Poso Energy telah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan karena pencemaran yang ditimbulkannya. satu pencemaran air sungai, air sungai sering digunakan oleh masyarakat namun air sungai tidak dapat digunakan seperti sebelum PLTA beroperasi, hal ini tidak hanya menambah tekanan pada perempuan untuk memenuhi kebutuhan air keluarga mereka, tetapi juga menyebabkan masalah

kesehatan kulit dan dalam beberapa kasus, masalah kesehatan reproduksi. Kerusakan jalan juga menghambat akses warga terhadap fasilitas kesehatan. pencemaran air, banjir yang merusak tanaman penduduk, dan sedimentasi yang disebabkan oleh pengerukan Danau Poso merupakan beberapa konsekuensi terhadap lingkungan, dan menyebabkan berbagai dampak bagi perempuan karena terkait dengan pekerjaan yang melekat pada peran gender mereka.

Hak atas perlindungan: Perempuan di daerah proyek merasa takut dan terancam keselamatan mereka, keluarga mereka, dan properti mereka, termasuk rumah dan lahan pertanian. Selain itu, perempuan adat Pamona yang membela Danau Poso tidak memiliki perlindungan untuk identitas budaya atau hak kolektif tradisional mereka. Pengerukan Danau Poso mengancam beberapa situs penting.

### **Analisis Kebijakan Nasional dan Lokal**

Pemerintah nasional menganggap proyek PLTA Poso sebagai langkah penting untuk mencapai sejumlah tujuan nasional.

Pertama, PLTA sejalan dengan tujuan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi target yang diuraikan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Energi yang dihasilkan PLTA dianggap bersih karena tidak menghasilkan emisi langsung, tidak seperti pembangkit listrik berbasis fosil. Kedua, PLTA membantu memastikan keamanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang harganya berfluktuasi di pasar dunia. Akhirnya, proyek sebesar PLTA Poso dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pasokan listrik untuk mendukung kegiatan industri dan masyarakat.

Regulasi terkait proyek PLTA Poso Energy pertama Undang - undang no 30 tahun 2007 tentang energi yang mendefinisikan energi terbarukan sebagai sumber yang dihasilkan dari sarana berkelanjutan yang meliputi misalnya panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, sungai dan air terjun serta energi yang dimanfaatkan dari pergerakan dan perbedaan suhu laut. sumber energi yang digunakan oleh PLTA untuk menghasilkan listrik adalah sumber yang berasal dari sungai dan air terjun Sulewana. PLTA adalah kategori energi terbarukan.

Kemudian turunan undang - undang energi ditetapkan dalam kebijakan energi nasional dalam PP No 79 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. namun pada prakteknya proyek PLTA Poso yang ada di Kabupaten Poso di bangun tanpa keterbukaan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat setempat. Prinsip keadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang seharusnya dipenuhi namun pada implementasinya proyek tersebut menciptakan kerusakan pada lingkungan dan tidak berasaskan pada keadilan berdampak pada tidak adanya keberlanjutan bagi kehidupan khususnya Masyarakat dan Perempuan.

Pemerintah daerah memiliki perspektif yang berbeda mengenai proyek PLTA Poso. Di satu sisi, proyek tersebut dipandang sebagai katalisator pertumbuhan pedesaan, meningkatkan akses listrik, infrastruktur, dan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Di sisi lain, proyek besar seperti PLTA seringkali memicu konflik sosial terkait pengadaan lahan, ganti rugi, dan dampak lingkungan. Sayangnya, sebagai tanggapan terhadap masalah sosial ini, pemerintah daerah seringkali berusaha untuk menekan keluhan dan protes publik.

Bahwa Undang-undang dan kebijakan perubahan iklim seringkali menggeneralisasi dampak tanpa memperhitungkan perbedaan antara gender. Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim. Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Perempuan berdampak lebih bila kebijakan mengatasi perubahan iklim hanya sebatas menambah program pembangunan fisik serta menarik lebih banyak investasi iklim tanpa mengatasi akar permasalahan iklim.

Program transisi energi pemerintah Indonesia hanya berfokus pada mengalihkan sumber listrik dari batu bara ke sumber energi terbarukan seperti PLTA. Meskipun Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memasukkan perspektif gender ke dalam tindakan iklimnya, termasuk transisi energi yang adil, namun fokus utamanya hanya pada kesenjangan gender dalam pemanfaatan energi terbarukan. Tidak melihat kebutuhan apakah proyek PLTA benar – benar

dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan benar – benar solusi bagi perubahan iklim atau tetap menyumbang emisi.

Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2021, Bali Energy Transition Roadmap G20, dan Comprehensive Investment and Policy Plan Just Energy Transition Partnership Indonesia (CIPP JETP) 2023 adalah beberapa instrumen yang mencakup komitmen terhadap keterlibatan masyarakat dan kesetaraan gender. *Namun, inisiatif-inisiatif ini hanya melanjutkan tren pergeseran sumber energi tanpa mengatasi akar penyebab krisis iklim.*

Jawaban yang salah ini tidak hanya akan gagal mengatasi masalah, tetapi juga akan berdampak pada perempuan. Dan hal ini jarang dipertimbangkan secara menyeluruh ketika menilai implikasi potensial pada kelompok masyarakat, terutama perempuan, yang akan menanggung beban konsekuensinya.

### **Inisiatif Perempuan**

Setelah melakukan penelitian FPAR, perempuan mendapatkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan akar penyebabnya juga kaitannya dengan hadirnya proyek PLTA Poso di Kabupaten Poso. Sehingga Perempuan di lima desa ini telah terorganisasi bersama dalam menolak solusi palsu iklim yang menimbulkan dampak gender pada perempuan. Mereka telah bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka setelah terlibat dalam kegiatan penelitian FPAR dengan kegiatan - kegiatan peningkatan pengetahuan kapasitas serta diskusi terfokus tentang dampak gender perempuan yang muncul akibat proyek PLTA Poso.

Aksi kolektif ini dimotivasi oleh Pencemaran sungai, hilangnya mata pencaharian, dan kerusakan properti (rumah) yang disebabkan oleh aktivitas PLTA. Rekan peneliti mengidentifikasi ada 23 rumah yang terdampak rusak dan 1 fasilitas umum (gereja) di Desa Sulewana. Perempuan dari Desa Sulewana yang rumahnya terdampak menginisiatif melakukan kunjungan ke pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Poso bersama pemerintah desa Sulewana yang mendukung perempuan selama ini yaitu sekretaris desa Sulewana, pertemuan dilakukan tanggal 03 September 2024, bertemu langsung dengan kepala DLH Kab Poso ibu Murniati Putosi, Mereka bersama – sama menyampaikan kekhawatiran mereka tentang pencemaran air sungai, hilangnya mata pencaharian masyarakat, kerusakan rumah masyarakat, dan fasilitas umum

akibat aktivitas perusahaan. Mereka juga memberikan dokumen berisi data masyarakat yang tempat tinggalnya terdampak (rusak), diterima langsung oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso.

selanjutnya dalam pertemuan perempuan juga menyampaikan permintaan peminjaman dokumen penilaian lingkungan resmi (AMDAL) PLTA Poso Energy. Namun kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten Poso tidak dapat memberikan dengan alasan bahwa dokumen itu bersifat rahasia karena dokumen itu dibuat oleh perusahaan dan hanya pihak mereka yang boleh melihatnya, dokumen AMDAL merupakan prasyarat wajib bagi perusahaan sebelum melakukan pembangunan. Dokumen ini berisi analisis dampak lingkungan yang potensial serta langkah – langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial terjadi, oleh karena itu kami perlu mendapatkan dokumen ini sebagai bahan kajian untuk melakukan advokasi.

Pada tanggal 5 September 2024 Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso menindaklanjuti keluhan/laporan langsung perempuan dan pemerintah desa Sulewana dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, melihat langsung kerusakan rumah dan fasilitas umum (gereja) yang disampaikan oleh perempuan. setelah pemerintah melihat langsung dampak kerusakan rumah dan fasilitas umum (gereja), DLH, perempuan dan Pemdes Sulewana yang terlibat melakukan diskusi bersama untuk membahas tindak lanjut dari tinjauan lapangan tersebut. Hal ini menjadi satu langkah awal bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan atas sumber kehidupan mereka yang telah dihilangkan dan mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat khususnya perempuan.

Inisiatif perempuan yang telah mengikuti pelatihan FPAR dan peningkatan kapasitas lainnya mulai sadar dan bertindak membangun kekuatan kolektif dengan membagikan pengetahuannya kepada perempuan lain di desanya, dengan mengajak mereka untuk hadir dalam diskusi – diskusi membahas masalah dampak pembangunan dan menolak proyek solusi iklim palsu di Kabupaten Poso. Gerakkan kolektif perempuan akan terus tumbuh dan menjadi kuat dan hal ini akan menjadi perubahan dengan munculkan pemimpin – pemimpin komunitas yang dipimpin oleh perempuan. namun perempuan mendapat tantangan struktural tersendiri karena sistem patriarkis yang sangat kuat di masyarakat desa.

Perempuan menghadapi hambatan sebagai akibat dari struktur sosial yang terus memberikan lebih banyak kekuasaan kepada laki-laki, sehingga suara perempuan seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting. Meskipun tidak ada larangan bagi perempuan untuk turut terlibat dalam pertemuan warga atau mengadakan pertemuan antar perempuan itu sendiri, namun perempuan selalu dibebankan tugas domestik seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Akibatnya, ruang dan waktu perempuan untuk berpartisipasi menjadi terbatas. Perempuan seringkali hadir dalam forum dalam keadaan yang sudah sangat lelah atau tidak bisa secara penuh karena harus pulang cepat untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Untuk mengatasi situasi ini, berbagai opsi dapat dipertimbangkan, seperti mengadakan pertemuan yang lebih singkat yang fokus pada isu-isu tertentu. Selain itu, fasilitas penitipan anak dapat disediakan selama pertemuan untuk memudahkan ibu membawa anak-anak mereka.

Namun, setelah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, perempuan telah memperoleh kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk berbicara dan mengadvokasi hak-hak mereka. Mereka juga telah mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan kini mengambil peran yang lebih menonjol dalam komunitas mereka. Selain itu, inisiatif ini juga telah berhasil memobilisasi komunitas untuk mendukung perjuangan perempuan. Melalui kampanye publik, penjangkauan media sosial, dan pertemuan komunitas, perempuan telah mampu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif proyek PLTA.

## **Bagian 4: Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Proyek PLTA Poso, yang dipromosikan sebagai solusi untuk masalah energi dan penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun telah memberikan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan perempuan di lima desa sekitarnya. Konsekuensi ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan penurunan kesejahteraan. Perempuan secara khusus lebih rentan karena mereka sering bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya.

Proyek ini juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan melanggar hak-hak perempuan. Untuk menghindari kejadian serupa, diperlukan pergeseran fundamental dalam praktik pembangunan yang lebih berpusat pada manusia, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah setempat menganggap proyek ini sebagai langkah penting untuk mencapai target energi terbarukan dan memastikan keamanan energi nasional. Namun, di tingkat lokal, proyek ini telah menghasilkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian universitas School of Environment of the Washington State University in Vancouver (Sekolah Lingkungan Hidup Washington State University di Vancouver), yang mengatakan bahwa bendungan menghasilkan 25 % metana berkontribusi terhadap pemanasan global. Metana yang dihasilkan dari dasar bendungan, dimana tempat kadar oksigen rendah, bakteri mengurai bahan organik, pohon dan rumput yang terbawa oleh saluran air dan metana tersebut menjadi CO<sub>2</sub>, sisanya yang muncul dipermukaan akan menghasilkan gelembung, dimana gelembung tersebut yang menghasilkan emisi.

Penelitian FPAR menghasilkan kesimpulan kolektif bahwa proyek PLTA yang diklaim sebagai energi ramah lingkungan yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, faktanya PLTA Poso adalah solusi palsu bagi krisis iklim.

Berdasarkan hasil kajian tersebut yang menunjukkan bahwa bendungan PLTA Poso dapat menghasilkan metana (CH<sub>4</sub>) yang justru berkontribusi menyumbang

peningkatan pemanasan global. Hal ini menunjukkan bahwa PLTA Poso Energy, sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai energi bersih atau energi yang ramah lingkungan karena justru berpotensi meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang justru menyumbang pemanasan global. PLTA Poso adalah solusi palsu perubahan iklim. Belum lagi ditambah dengan dampak dari pembangunan PLTA itu sendiri.

Proyek PLTA Poso memunculkan masalah baru bagi masyarakat khususnya perempuan. Perempuan sangat rentan terhadap perubahan iklim, di tambah lagi dengan masalah yang ditimbulkan dari proyek iklim pemerintah. Beban perempuan semakin bertambah akibat dari kebijakan iklim yang salah.

Hasil temuan serta analysis bersama memberikan peningkatan kapasitas pada perempuan terkait kebijakan iklim, solusi palsu iklim dan hak – hak dasar perempuan meningkatkan kepercayaan diri mereka, keterampilan kepemimpinan, dan kemampuan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Melalui aksi kolektif dan jaringan, perempuan telah mampu memperkuat suara mereka dan akan memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan.

Beberapa rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut dibuat berdasarkan temuan-temuan ini, termasuk:

**Rekomendasi di tingkat Pemerintah Nasional, Provinsi Sulawesi tengah, Daerah Kabupaten Poso, Pemerintah Desa.**

1. Pemerintah Nasional harus mengkaji kembali terkait kebijakan transisi energi yang diklaim sebagai solusi perubahan iklim yang efektif, namun ternyata adalah solusi palsu yang menimbulkan dampak berlapis bagi perempuan seperti proyek PLTA Poso. Pemerintah harus melihat benar akar penyebab krisis iklim dan memberikan solusi pasti yang tidak merugikan masyarakat.
2. Pemerintah Nasional harus memastikan bahwa investasi dalam pendanaan iklim tidak boleh memaksakan tanggung jawab baru pada negara yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat, seperti skema utang.

3. Pemerintah Nasional dan daerah wajib mengadakan konsultasi terbuka dengan masyarakat di setiap wilayah lokasi pembangunan proyek nasional yang mengatasnamakan solusi perubahan iklim. memastikan bahwa dalam konsultasi menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Hal ini harus menjadi dasar bagi tindakan pemerintah, yang memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian.
4. Pemerintah memprioritaskan hak asasi manusia masyarakat, terutama perempuan, dan lingkungan di atas keuntungan finansial.
5. Pemerinta daerah mencabut izin perluasan PLTA Poso 3 – 4 karena proyek PLTA adalah solusi iklim yang salah dan bahwa PLTA memberikan dampak negatif bagi masyarakat setempat.
6. Pemerintah daerah melakukan “moratorium” menghentikan/membekukan sementara segala aktivitas perusahaan dan melakukan penilaian atas dampak lingkungan dan dampak kerugian pada masyarakat akibat aktivitas proyek PLTA berdasarkan rekomendasi hasil penelitian FPAR perempuan di 5 desa Saojo, Sulewana, kuku, Tampemadoro, dan Pandiri.
7. Pemerintah dan perusahaan harus membuka informasi ke publik mengenai dokumen lingkungan (AMDAL) perusahaan PLTA Poso.
8. Pemerintah daerah dan desa harus menyelesaikan tuntutan masyarakat di 5 desa yang terdampak, terutama hilangnya mata pencaharian nelayan sungai dan polusi air sungai dengan mediasi pertemuan antara masyarakat dan perusahaan PLTA Poso.

### **Rekomendasi Pada Perusahaan BUMN/Swasta**

1. Menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan 23 rumah warga, 1 fasilitas umum (gereja) dan ganti rugi lahan & pagar sogili/ waya masapi yang belum dibayar sampai saat ini.
2. Perusahaan dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik horizontal yang ditimbulkan oleh PLTA Poso Energy dan wajib memastikan terlaksananya Free Prior Informed Consent (FPIC) persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi.

## Advokasi

FPAR yang dilakukan oleh komunitas perempuan di sekitar PLTA Poso telah mengungkapkan fakta mengejutkan: proyek tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, menghilangkan mata pencaharian masyarakat, petani yang kehilangan lahan, masyarakat pamona yang kehilangan budaya mosango, dan menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. PLTA Poso bukan energi bersih seperti yang di banggakan oleh pemerintah. PLTA adalah solusi palsu pemerintah dalam kebijakan iklim. untuk itu kita perlu melakukan.

1. Menyebarkanluaskan hasil penelitian untuk memberikan masukan dan wawasan dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil lokal, organisasi yang fokus pada isu lingkungan dan iklim
2. Melakukan audiensi dengan komisi nasional hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Perusahaan PLTA Poso.
3. Mengadakan pertemuan dengan pemimpin desa terpilih untuk menyampaikan hasil temuan, sehingga dapat mempengaruhi perspektif mereka dan dapat menghentikan perluasan PLTA poso 3 – 4
4. Mengadakan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan untuk mengubah perspektif mereka terkait PLTA Poso.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen analisis lingkungan (AMDAL) PLTA Poso, sebagai bahan kajian bagi perempuan untuk melakukan advokasi selanjutnya
6. Melakukan aksi di depan kantor Bupati Poso menuntut tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas PLTA Poso.

# LAMPIRAN

## Lampiran A: Laporan Kegiatan

| No | activity report                                                      | Date                     | description                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tim (Mentor dan Peneliti) yang melakukan Asesmen di Desa Sulewana    | 29-09-2023               | Mengidentifikasi perempuan akar rumput yang akan mendukung pelaksanaan penelitian dan pertemuan dengan 5 perempuan akar rumput dari desa Sulewana.                                                                                           |
| 2  | Tim (Mentor dan Peneliti) yang melakukan Asesmen di Desa Tampemadoro | 16-10-2023               | Mengidentifikasi perempuan akar rumput yang akan mendukung pelaksanaan penelitian dan bertemu dengan 12 perempuan akar rumput dari Desa Tampemadoro                                                                                          |
| 3  | Tim (Mentor dan Peneliti) yang melakukan Asesmen di Desa Saojo       | 24-10-2023               | Mengidentifikasi perempuan akar rumput yang akan mendukung pelaksanaan penelitian dan bertemu dengan 11 perempuan akar rumput dari Desa Saojo                                                                                                |
| 4  | Konsultasi Pra-FPAR (Pelatihan FPAR)                                 | 21-11-2023<br>22-11-2023 | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) melakukan konsultasi tentang FPAR di balai pertemuan Sulewana. Peserta yang terlibat sebanyak 23 orang dari 5 komunitas, yaitu Desa Sulewana, Desa Saojo, Desa Tampemadoro, Desa Kuku, dan Desa Pandiri. |
| 5  | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Sulewana                         | 02-03-2024               | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 6 perempuan akar rumput yang terlibat dalam penelitian FPAR.                                                                                                                              |

|    |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Tim (Mentor dan Peneliti) yang melakukan Asesmen di Desa Pandiri | 03-03-2024 | Melakukan FGD dengan 10 perempuan akar rumput, membahas kembali aktor-aktor kekuasaan, mengidentifikasi aktor-aktor pemerintahan desa, mengumpulkan informasi baru.                                                                                                               |
| 7  | Tim (Mentor dan Peneliti) yang melakukan Asesmen di Desa Kuku    | 08-03-2024 | Melakukan observasi dengan rekan peneliti di desa Kuku, peserta FPAR dan 10 perempuan akar rumput dilibatkan. Mengumpulkan informasi dari Perempuan                                                                                                                               |
| 8  | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Tampemadoro                  | 28-04-2024 | Tim KFMS (Mentor Muda dan Peneliti) bertemu dengan 6 perempuan akar rumput, untuk mengumpulkan data berdasarkan temuan dan situasi yang disampaikan oleh para perempuan tersebut.                                                                                                 |
| 9  | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Sulewana                     | 08-05-2024 | TIM KFMS (Young Mentors and Researchers) bertemu dengan 8 orang perempuan akar rumput, untuk berdiskusi bersama mengenai situasi perempuan di Desa Sulewana yang terdampak oleh aktivitas PLTA PT Poso Energy. Selain itu, TIM KFMS juga bertemu dengan Pemerintah Desa Sulewana. |
| 10 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Saojo                        | 10-05-2024 | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 6 orang perempuan akar rumput untuk membahas situasi perempuan Desa Saojo yang mata pencahariannya sebagai nelayan sogili (waya masapi) yang bernilai                                                                          |

|    |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |            | budaya telah hilang akibat pembangunan PLTA Poso Energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Saojo       | 27-07-2024 | TIM KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 5 perempuan akar rumput yang terlibat dalam penelitian untuk berdiskusi bersama dan mengumpulkan data. Selain itu, untuk memperkuat kesadaran kritis perempuan terhadap hak-haknya dan menuntut pertanggungjawaban PLTA Poso karena aktivitas perusahaan telah merusak Pagar Sogili (Wayamasapi) yang merupakan sumber ekonomi perempuan.     |
| 12 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Pandiri     |            | TIM KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 8 orang perempuan akar rumput, 5 orang di antaranya adalah perempuan yang terlibat dalam penelitian. Pertemuan ini dilakukan untuk mengumpulkan data, selain itu para peneliti muda memaparkan tentang perubahan iklim terkini, kemudian tentang kebijakan energi baru terbarukan yang erat kaitannya dengan pembangunan PLTA PT Poso Energy. |
| 12 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Tampemadoro | 29-08-2024 | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 10 perempuan akar rumput, termasuk 5 peneliti komunitas, untuk mengumpulkan data di Desa Tampemadoro, yang akan menjadi                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |              | wilayah perluasan pembangunan PLTA Poso 3 milik PT Poso Energy.                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Kuku     | 30 – 08-2024 | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 7 perempuan akar rumput untuk mengumpulkan data di Desa Kuku berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah disusun bersama dalam desain penelitian FPAR.                                                                          |
| 14 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Sulewana | 18-09-2024   | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 9 perempuan akar rumput dan 2 orang dari Pemerintah Desa Sulewana. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pengetahuan masyarakat, Pemerintah Desa, tokoh adat, dan tokoh perempuan di Desa Sulewana.                                     |
| 15 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Pandiri  | 22-09-2024   | TIM KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 9 orang perempuan akar rumput untuk melakukan wawancara mendalam guna mengumpulkan informasi dan data mengenai PLTA PE yang akan diperluas pengembangannya di Desa Pandiri. melakukan wawancara mendalam dengan perempuan akar rumput. |
| 16 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Kuku     | 05-10-2024   | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 10 perempuan akar rumput untuk melakukan wawancara mendalam guna mengumpulkan informasi dan data penelitian di Desa Kuku.                                                                                                              |

|    |                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Tampemadoro                                       | 07-10-2024                             | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 12 perempuan akar rumput untuk melakukan wawancara mendalam guna mengumpulkan informasi dan data penelitian di Desa Tampemadoro.                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Pelatihan Advokasi Feminis bagi Perempuan di Kawasan Pengembangan PLTA PT Poso Energy | 22-10-2024<br>23-10-2024<br>24-10-2024 | Tim KFMS (Young Mentors and Researchers) melaksanakan pelatihan advokasi kepada 25 orang peneliti perempuan FPAR yang berasal dari 5 daerah yaitu Desa Sulewana, Desa Saojo, Desa Tampemadoro, Desa Kuku dan Desa Pandiri, pelatihan dilaksanakan di Aula Hotel 99 Poso, Sulawesi Tengah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam melakukan advokasi. |
| 19 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Kuku                                              | 26-10-2024                             | TIM KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 10 orang perempuan akar rumput melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi dan data-data untuk melengkapi data penelitian.                                                                                                                                                                                        |
| 20 | Diskusi Desa (Mogombo Lipu) di Desa Tampemadoro                                       | 27-10-2024                             | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) bertemu dengan 12 perempuan akar rumput untuk melakukan wawancara mendalam, mengumpulkan informasi dan data untuk melengkapi data penelitian.                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | Audiensi Bersama dengan Dinas                                                         | 04-11-2024                             | Tim KFMS (Mentor dan Peneliti Muda) melakukan pertemuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lingkungan Hidup Kabupaten Poso                                           |                 | dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso (Murniati Putosi, SE, Msi) beserta Sekretaris dan 1 orang staf. Diskusi dihadiri oleh 3 orang perwakilan perempuan dari Desa Sulewana, Ibu Malvin Baduge (asisten peneliti), Ibu Novi, Ibu Sardin T (PAR Desa Sulewana), kemudian Perwakilan Sekretaris Pemerintah Desa Sulewana (David B), Kepala Dusun III (Yeheskiel P), Peneliti Muda dan Mentor. |
| 22 | Kunjungan Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso ke Desa Sulewana | 06-11-2024      | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso mendatangi Desa Sulewana untuk melihat langsung kerusakan lingkungan dan rumah warga perempuan akibat aktivitas PLTA PT Poso Energy.                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | Talkshow: Kisah Perempuan yang Hidup Berdampingan dengan Proyek Energi    | 10-12-2024      | Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari HAM Sedunia tanggal 10 Desember 2024, dengan peserta sebanyak 46 orang peserta yang berasal dari peneliti pendamping perempuan dari 5 desa yang melaksanakan penelitian FPAR, ibu-ibu & masyarakat akar rumput serta pemerintah desa dari Desa Sulewana (Kepala Dusun III) di wilayah terdampak pembangunan proyek PLTA energi Poso.                     |
| 24 | Penyusunan Draft Laporan FPAR                                             | Juni – des 2024 | Laporan DRAFT FPAR Kelompok Feminis Muda Sulewana telah dilaksanakan pada bulan Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | sampai dengan September 2024, sebelum pelatihan ke-3 di Jakarta, laporan ini disusun oleh para mentor, Peneliti Muda dan peneliti perempuan desa lainnya. Dalam laporan ini, banyak data yang telah terkumpul di lapangan selama kurun waktu 6-7 bulan yang dibahas kembali. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan metode wawancara dan diskusi desa serta live in. |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lampiran B: Refleksi Peneliti

**Peneliti Muda:** FPAR telah mengubah pemahaman saya tentang penelitian partisipatif. Dengan mengintegrasikan perempuan sebagai mitra sejajar dalam proses penelitian, saya tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga turut membangun narasi baru tentang peran perempuan dalam masyarakat. FPAR memungkinkan saya untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang dihadapi perempuan, seperti ketidaksetaraan gender dan dampak perubahan iklim. FPAR mengajarkan saya bahwa perempuan tidak hanya korban, tetapi juga agen perubahan yang tangguh. Pengalaman ini telah mengubah cara saya melihat dunia dan mendorong saya untuk terus memperjuangkan keadilan gender.

**Mentor:** Menurut pemahaman saya, FPAR adalah penelitian yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi manusia perempuan. Perempuan diundang untuk melihat posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan dan peran mereka sebagai individu dan dalam keluarga dan komunitas mereka, memetakan masalah yang mereka hadapi terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya sosial dan sumber daya alam seperti tanah, air, dan hasil bumi, kemudian mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memikirkan solusi. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan perempuan dalam mengatasi masalah ketidakadilan yang mereka hadapi, penting untuk mengungkap akar penyebab ketidakadilan tersebut.

**Dalam pelaksanaannya, FPAR melibatkan perempuan di komunitas yang pernah menghadapi ketidakadilan terkait hak-hak mereka.**

Untuk mencapai perubahan yang dituntut perempuan dalam mengatasi masalah ketidakadilan yang mereka alami, penting untuk mengungkap akar penyebab ketidakadilan tersebut. Diharapkan perbaikan yang dibawa oleh FPAR akan memungkinkan perempuan di komunitas untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan, serta menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Secara pribadi, dengan melakukan FPAR, saya dapat menemukan akar permasalahan dari ketidakadilan yang saya dan perempuan lain alami, dan setelah mengetahui akar permasalahan tersebut, bagaimana perempuan menjadi sadar dan berpikir kritis untuk dapat

bertindak dan menentukan strategi terbaik untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Setelah melakukan penelitian FPAR pembelajaran yang kami dapatkan bersama adalah perempuan di komunitas dari 5 desa meningkatnya pengetahuan mereka tentang proyek PLTA Poso Energi, dari yang awalnya mereka hanya tahu proyek tersebut adalah proyek pemerintah yang menghasilkan listrik. Sekarang pengetahuan mereka bertambah bahwa kehadiran proyek PLTA di kabupaten poso adalah bagian dari komitmen pemerintah RI upaya mencegah kenaikan temperatur suhu bumi di bawah 2°C (Paris Agreement 2015) melalui pengembangan energi terbarukan, kebijakan energi baru terbarukan EBT salah satu upaya pemerintah RI dalam mengatasi krisis iklim global. Dari hasil temuan di lapangan tentang proyek PLTA Poso Energi menimbulkan masalah dampak negatif dari ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi secara signifikan dirasakan oleh masyarakat khususnya perempuan di 5 desa yang paling terdampak, olehnya proyek ini adalah solusi yang salah (palsu) mengatasi perubahan iklim.

Banyak hal yang menarik dalam pertemuan – pertemuan diskusi bersama perempuan akar rumput di komunitas, beragam pengetahuan mereka tentang desa, tentang tanah, sungai, hutan, tanaman dan tentang budaya pamona dari masing – masing desa memiliki ciri khasnya sendiri. Dari cerita – cerita perempuan membuat kami saling lebih mengenal serta rasa persaudaraan kami menguat. Dengan berbagi cerita mereka merasa tidak sendirian berjuang untuk mendapatkan hak – hak nya serta keadilan yang seadil – adilnya. Kami saling menghargai dalam setiap prosesnya seperti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap perempuan untuk bercerita pengalamannya sehingga ruang diskusi ini menjadi ruang berbagi dan ruang aman bercerita.

Peneliti muda dan mentor selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan peneliti pendamping sebelum melakukan kunjungan ke lapangan untuk menentukan waktu & kesediaan ibu – ibu di desa. Dalam setiap pertemuan kami selalu menggunakan bahasa dan kerangka kerja yang mudah dipahami oleh perempuan di komunitas, seperti diskusi kampung disebut Wea Mogombo (perempuan bertemu & bercerita). Kami juga melakukan live in di desa sulewana dan tampemadoro hal ini sangat efektif karena kami dapat terlibat secara langsung

dengan keseharian mereka di desanya, misalnya pergi ke kebun jagung milik ibu malvin & ibu novi di sulewana bersama – sama memetik jagung memasaknya di kebun dan makan bersama sambil melakukan wawancara mendalam dengan mereka.

## Lampiran C: Profil Perempuan

Profil 5 perempuan peneliti pendamping berada pada lampiran dokumen penelitian.

Ester Pasolawa, seorang kepribadian yang teguh dari kampung halamannya di Saojo, telah melihat hidupnya terbalik. Tangannya, yang sebelumnya menjadi sakit karena merawat tanamannya, kini diangkat dalam protes. Upaya perusahaan yang terus-menerus mengejar kemajuan telah membuat Ester dan komunitasnya menghadapi kehilangan tanah mereka dan kerusakan pagar sogili komunal mereka. Meskipun menghadapi tantangan, Ester bertekad untuk merebut kembali apa yang telah diambil darinya dan rakyatnya.



Yufningsih Banumbu, juga dikenal sebagai Ibu Santi, adalah seorang petani yang pekerja keras dari Tampemadoro. Hari-harinya dihabiskan untuk menanam berbagai tanaman, termasuk jagung dan kakao, di lahan pertaniannya yang hijau di sepanjang tepi Sungai Poso. Ibu Santi lebih dari sekadar petani; ia adalah seorang penjaga tanah yang selaras

dengan irama alam. Namun, kehidupan damai-nya terancam. Pembangunan yang direncanakan untuk PLTA Poso Energy 3 di Tampemadoro akan melibatkan akuisisi lahan besar-besaran, yang secara langsung mempengaruhi propertinya di tepi sungai. Saat komunitas bersiap menghadapi perubahan besar yang akan dibawa oleh pembangunan ini, Ibu Santi berperan sebagai simbol keuletan dan tekad individu-individu yang mata pencahariannya terkait erat dengan tanah.



Wemi Nggau, yang tinggal di Desa Durian, Kuku, adalah seorang petani dan ibu rumah tangga yang rajin. Hari-harinya dihabiskan untuk mengurus kebunnya yang beragam, di mana ia menanam tanaman seperti kacang, jagung, dan durian. Wemi, yang bersemangat tentang pengobatan herbal, juga merawat taman Toga yang sehat yang dipenuhi dengan tanaman obat. Namun, pembangunan PLTA Poso Energi telah

memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan dan mata pencaharian Wemi. Pembukaan lahan yang besar untuk proyek tersebut telah menyebabkan banjir berulang di ladang komunitasnya, termasuk kebun duriannya. Banjir yang sering terjadi ini telah mengakibatkan kegagalan panen yang besar, menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan jangka panjang operasi pertaniannya dan kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan. Meskipun menghadapi tantangan ini, Wemi tetap tangguh, mengolah tanahnya, dan menyediakan kebutuhan keluarganya.



Verawati M, seorang petani dan peneliti dari desa Pandiri, menunjukkan ketangguhan masyarakat pedesaan dalam menghadapi pembangunan. Kehidupannya berubah drastis ketika tanaman padinya digenangi oleh air yang dilepaskan secara tak terduga dari PLTA Poso. Bertekad mencegah tragedi di masa depan, ia telah menjadi juara yang menonjol bagi komunitasnya, menggunakan temuannya untuk mengekspos kerentanan petani pedesaan.

Malvin Baduge adalah seorang petani yang bertekad tinggal di Sulewana. Dia telah menghabiskan banyak jam merawat

tanaman padi ladangnya, selain padi ladang dia juga menanam jagung dan kacang di samping tanaman utamanya. Malvin, seperti banyak tetangganya, telah mengalami kenyataan pahit dari akuisisi lahan dan kerusakan properti akibat pembangunan terus-menerus di tepi sungai. Meskipun menghadapi tantangan ini, Malvin tetap berkomitmen pada tanah dan komunitasnya. Keteguhan dan keuletannya merupakan contoh semangat masyarakat Sulewana. Dia terus mengolah tanahnya, memberi makan keluarganya, dan mendukung ekonomi lokal. Kisah Malvin adalah pengingat yang kuat tentang biaya manusia dari pembangunan dan pentingnya membantu populasi pedesaan.



## Lampiran D: dokumentasi



Gambar identifikasi awal bertemu dengan perempuan desa sulewana ibu Malvin baduge di kebun miliknya



Diskusi desa di desa Pandiri, melakukan pengumpulan data dan analisis data bersama-sama



Tempat nelayan menyebrang sungai untuk pergi ke seberang sungai berkebun. juga gambar kiri diskusi desa bersama perempuan berbagi informasi terkait situasi yang di alami perempuan desa sajo





gambar pertemuan diskusi bersama pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso bersama masyarakat desa Sulewana yang terdampak, dan memberikan dokumen data rumah yang terdampak akibat aktivitas PLTA Poso energy, sumber foto KFMS



Gambar diskusi desa dengan perempuan akar rumput desa Sulewana yang dihadiri oleh pejabat pemerintah desa, menggali data dan informasi tentang dampak proyek pembangkit listrik tenaga air terhadap kehidupan perempuan, sumber foto KFMS



Gambar tinjauan lapangan oleh Pemerintah DLH di Desa Sulewana, tempat rumah Ibu Malvin Baduge





Pelatihan FPAR dan membangun rencana penelitian bersama 23 perempuan dari 5 desa, Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, dan Pandiri, sumber foto KFMS



Training advokasi Peneliti FPAR dan Peserta FPAR, sumber foto KFMS

## **Data rumah warga yang rusak akibat aktivitas PLTA Poso Energy desa Sulewana**

### **1. Malvin Baduge / Petani**

kronologis rusaknya tempat tinggal ibu Malvin B, khususnya di bagian dapur dan kamar mandi dari tahun 2018 sampai sekarang. Kondisi dapur dan kamar mandi saat ini sangat parah hampir roboh diduga akibat aktivitas peledakan batuan di sungai dan pengerukan danau dan sungai. kerusakan ini membuat ibu malvin dan keluarganya menjadi khawatir dan merasa tidak aman beraktivitas di dalam rumah. kondisi dapur yang sudah miring menambah beban fisik dan psikis lebih banyak kepada ibu malvin karena peran gender yang melekat pada dirinya sebagai istri yang harus menyiapkan kebutuhan makanan untuk keluarga. Luas rumah L 6 x P, 15 luas tanah L 13 x 18.



Rumah ibu Malvin dari luar terlihat pondasi rumah turun tidak persisi lagi dan gambar kiri bagian dalam kamar mandi yang terlihat retakan serta lantai kamar mandi yang rusak parah

### **2. Nelvin Tomori/ Petani**

Sejak tahun 2018 hingga sekarang mengalami dampak retaknya rumah bagian belakang akibat aktivitas PT. Poso Energy. Bu Nelvin Tomori sudah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah desa untuk memperhatikan keadaan rumahnya. Namun sampai pada 2020 tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Desa terkait kasus ini. Karena rumah bagian belakang sudah retak pondasinya, Bu Nelvin Tomori dan suami berusaha setiap hari mencari uang untuk memperbaiki rumah dan membangun kembali

pondasi rumah bagian belakang agar tidak bertambah parah. Luas Rumah L 8 x P 12, luas tanah L15 x 25



Rumah ibu nelvin bagian belakang

### 3. Novi Badjaji / Petani

Aktivitas PT. Poso Energy sejak tahun 2018 menyebabkan rumahnya di bagian dapur dan kamar mandi menjadi rusak dan retak. Lokasi rumah Bu Novi Bajadji membelakangi sungai Poso yang mana ketika menurutnya PT. Poso energy beraktivitas di sekitar aliran sungai, beberapa rumah warga termasuk salah satunya rumah nya mulai retak, dan yang parah sekali kamar mandi saya yang retak dan sudah mulai miring sebelah, sampai saat ini kami merasa tidak nyaman ketika mau beraktivitas di dapur dan kalau kami mau ke kamar mandi merasa takut. Upaya yang telah dilakukan Bu Novi Bajadji adalah melaporkannya kepada pihak Pemerintah Desa, namun hingga saat ini tidak ada respon dari pemerintah. Luas rumah L 5 x P 6, luas tanah L 9 x P 10



Bagian kamar mandi rumah ibu novi yang miring dan hampir roboh

#### 4. Rince lasamana / petani

Bu Rince Lasamana adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki 3 orang anak dan beraktivitas sehari-hari mengurus keluarga dan membantu suami di kebun. rumah beliau sudah ada sejak awal terbentuknya desa yang pertama kali dengan nama desa tarawana, mereka sudah hidup berdampingan puluhan tahun dengan sungai dan hutan.

Bahwa sejak 2018 Bu Rince Lasamana dan keluarga merasakan dampak langsung dari aktivitas PLTA Poso Energy, hal tersebut dibuktikan dengan retak dan hancurnya bagian dapur tempat cuci piring, termasuk kamar mandi dan WC. Kondisi bak kamar mandi saat ini tidak bisa digunakan. sekitar 4 tahun Bu Rince dan keluarga merasakan dampak dari aktivitas PLTA Poso Energy, namun hingga saat ini tidak ada respon dari pemerintah maupun perusahaan terhadap kerusakan rumahnya. Luas Rumah P 10 m x 16 m

#### 5. Yernalis Paramao / Petani

Yernalis Paramo adalah seorang petani perempuan yang memiliki 2 orang anak, dan suami yang juga berprofesi sebagai petani. Yernalis Paramo dan keluarga masih tinggal di rumah orangtua. menurutnya bahwa semenjak

tahun 2018 dia dan keluarganya terdampak dari aktivitas PT. Poso Energy karena aktivitas yang dilakukan di daerah aliran sungai poso yang jaraknya hanya beberapa meter dari belakang rumahnya.

Semenjak PT. Poso Energy beraktivitas di daerah aliran sungai, bagian lantai dan dinding dapur dan kamar mengalami keretakan dan hampir roboh. Hingga sampai saat ini Bu Yernalis Paramo dan keluarga tidak berani untuk tidur di kamar, dikarenakan kondisi dinding kamar yang sudah sangat parah. Bahwa saat ini Bu Yernalis Paramo dan keluarga sekarang tidur di ruang tamu setiap malam karena merasa tidak aman dan nyaman lagi tidur di dalam kamarnya sendiri. Upaya mereka sudah melaporkan dampak ini kepada pemerintah desa, namun sudah 4 tahun berjalan tidak ada respon dari pemerintah desa sulewana.

Bahwa pihak Pemerintah Desa sudah beberapa kali datang dan melihat keadaan rumah, mereka pun berkomitmen untuk melaporkan kepada pihak perusahaan, tapi hingga sampai saat ini tidak ada juga realisasinya. Luas Rumah P 12 m x 6 m, Luas Tanah P 20m x L 11 m.



Kondisi rumah ibu yernalis bagian ruang tamu yang dijadikan tempat tidur dan dinding kamar tidur yang retak dan hampir roboh

## 6. Rin Baduge / Petani

Bahwa Bu Rin Baduge adalah seorang ibu rumah tangga bekerja sebagai petani bersama suaminya di kebun. Sejak 2018 kami, Bu Rin Baduge dan keluarga merasakan dampak dari aktivitas PT. Poso Energy, dimana rumahnya mengalami kerusakan dinding dapur dan lantai dapur retak sangat parah. sehingga membuat dia dan keluarga memilih untuk meninggalkan rumah karena merasa tidak aman dan nyaman lagi dengan kondisi rumah nya saat ini. Luas rumah P 12 m x L 12 m, luas tanah L 16 m x P 20 m

Tahun 2020 Bu Rin Baduge dan suami bekerja keras mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengumpulkan uang untuk membangun rumah lagi yang berlokasi jauh dari daerah aliran sungai. Tahun 2022 Rin Baduge dan keluarga sudah pindah di rumah yang baru, karena rumah yang lama sudah tidak bisa lagi ditempati. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaporkannya ke pemerintah desa, hingga pemerintah desa sudah melakukan survey, namun selanjutnya tidak ada respon dari mereka terkait tindak lanjut terhadap dampak yang dirasakan Bu Rin Baduge sekeluarga. Bahwa pihak pemerintah mengatakan untuk menunggu dari pihak perusahaan yang akan melakukan peninjauan secara langsung di rumah yang terkena dampak. Namun hampir 4 tahun berlalu tidak ada tindak lanjut dari apa yang mereka janji.



Kondisi rumah ibu rin baduge bagian dapur yang rusak parah, tidak layak untuk di tempati lagi

## 7. Yadi Tenggeli / Petani

Bapak Yadi Tenggeli adalah salah satu warga masyarakat desa Sulewana yang terdampak dari aktivitas PT. Poso Energy. Bahwa sejak tahun 2018 mereka mengalami dampak dari beraktivitas perusahaan tempat tinggalnya rusak parah, saat ini bapak Yadi Tenggeli sudah tidak tinggal di rumahnya.

beliau sudah melaporkan situasi rumahnya yang terdampak kepada pemerintah desa sulewana, sudah 4 kali pemerintah desa datang melihat rumahnya, namun pihak pemerintah desa menyampaikan bahwa kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak perusahaan. Hingga sampai saat ini tidak ada respon dari pihak perusahaan atas informasi dari pemerintah desa sulewana terkait kerusakan rumah akibat aktivitas perusahaan. Keinginan bapak yadi dan masyarakat terdampak adalah ganti rugi tempat tinggal mereka yang telah rusak juga ingin ada pemulihan terhadap pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sungai.



Kondisi tempat tinggal keluarga bapak yadi tenggeli yang terdampak, pondasi rumah hancur terpisah dari bangunan rumah

## 8. Dirmas Tenggeli / Petani



Kondisi Rumah bapak Dirmas Tenggeli terdampak mengakibatkan retakan pada lantai dan dinding rumah

Bahwa Bapak Dirmas Tenggeli memiliki 3 orang anak dan istri. menurut beliau sejak tahun 2018 beliau merasakan dampak dari aktivitas PT. Poso Energy, dimana lantai rumah bagian dapur mulai ada retakan dari awalnya kecil menjadi besar dan bertambah setiap harinya, sekarang beliau dan keluarga memilih meninggalkan rumahnya karena merasa tidak nyaman dan aman lagi tinggal lebih lama di rumah tersebut. Luas rumah L 8 x P 12, Luas tanah L 11 x P 14.

Tahun 2020 Bapak Dirmas Tenggeli dan istri bekerja keras mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengumpulkan uang untuk membangun rumah baru yang berlokasi jauh dari daerah aliran sungai. upaya yang sudah dilakukan beliau melaporkan situasi tersebut ke pemerintah desa sulewana, dan pemerintah desa meninjau keadaan rumahnya saat itu, namun tidak ada respon dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa. Bahwa pihak pemerintah mengatakan untuk menunggu dari pihak perusahaan yang akan melakukan peninjauan

secara langsung di rumah yang terkena dampak. Namun sudah 4 tahun berlalu tidak ada tindak lanjut dari apa yang mereka janjikan.

#### 9. Yeheskiel Paramou / aparaturnya desa

Bapak yeheskiel paramou saat ini bekerja sebagai aparaturnya desa di pemerintahan desa sulewana, juga dipercayakan sebagai kepala dusun III. tempat tinggal beliau juga terdampak akibat aktivitas PLTA Poso Energy menurut beliau kerusakan mulai dirasakan saat perusahaan melakukan aktivitas peledakan batuan di sungai dan pengerukan dasar sungai. beliau masih menempati rumahnya hingga saat ini walaupun kondisinya sudah tidak layak. Luas rumah L 6 x P 18, luas tanah L 7 x P 30



Rumah bapak yeheskiel paramou terdampak mengakibatkan dinding dapur sebagian hancur, mengatasinya dengan menutupnya menggunakan kayu dan seng

#### 10. Yustina Penda / petani



Rumah bapak yustina penda terdampak mengakibatkan dinding dapur retak dan berpotensi roboh

Bapak Yustina penda mulai merasakan dampak dari aktivitas PLTA Poso sejak PLTA poso mulai melakukan peledakan batuan di sungai, juga

dampak mulai lebih parah saat PLTA Poso 1 mulai beroperasi. kerusakan awal mulai dilihat dari bagian dinding dapur yang terbelah, kemudian bagian kamar dan juga ruang keluarga. beliau dan keluarga saat ini terpaksa masih tetap tinggal walaupun setiap saat mereka merasa tidak nyaman dan aman lagi untuk tinggal. Luas rumah L 6 m x P 8 m, luas tanah L 6 m x P 10 m

#### 11. Resmi Suno/ Petani

Bapak Resmi suni juga salah satu masyarakat terdampak, menurut beliau tanah di bawah rumahnya berubah tidak sama seperti dulu, sekarang kondisi rumahnya miring ke arah sungai situasi ini mulai berubah sejak adanya aktivitas perusahaan di sungai. luas rumah L 5 m x 17 m, luas tanah L 514 m



Kondisi tempat tinggal bapak Resmi suno, pondasi rumah turun, kondisi rumah miring ke arah sungai

#### 12. Djaimu biulu

Bahwa bu Djaimu biulu adalah perempuan petani di desa sulewana, beliau seorang IRT, menurutnya selama dia tinggal di desa tidak ada kerusakan - kerusakan di rumahnya atau rumah warga lainnya, namun sejak PLTA poso energy melakukan aktivitas di pinggir sungai mulai ada kerusakan pada tempat tinggalnya, terlihat di dinding dapurnya yang terjadi keretakan.



gambar kerusakan dinding dapur  
tempat tinggal ibu Djaimu Biulu

### 13. Jati semani djepa / petani

Tempat tinggal ibu jati mengalami kerusakan bagian dinding kamar mandi, dan dinding dapurnya. Luas rumah P 18 m x L 8 m, luas tanah 600 m. menurut beliau dampak pada tempat tinggalnya mulai dirasakan semenjak PLTA Poso energy melakukan aktivitas peledakan batuan sungai.



gambar kerusakan dinding rumah  
ibu jati semani djepa

### 14. Berlian Tenggeli/ buruh tani

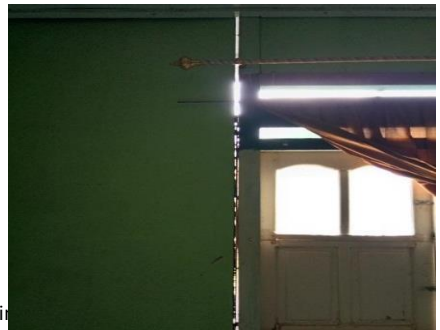
Ibu berlian seorang buruh tani yang bekerja di kebun orang lain, beliau juga merupakan kepala keluarga yang menafkahi kedua anaknya yang masih sekolah. tempat tinggalnya mengalami dampak menurutnya kerusakan ini terjadi akibat dari aktivitas PLTA Poso energy saat melakukan peledakan batuan di sungai, kerusakan terjadi pada kamar mandinya saat ini sudah hancur tidak dapat lagi digunakan, juga dinding kamar tidurnya retak dan pondasi rumahnya mulai miring/ tidak rata lagi. Luas rumah P 10 m x L 6 M, Luas tanah P 12 m x L 8 m. Sejarah tanah dibeli dari ibu Buni Raja Ntoda, pada tahun 2013.



Gambar pondasi rumah ibu berlian tenggeli yang terlihat miring / tidak rata lagi

#### 15. Budiani Balanda / petani

Kondisi tempat tinggal beliau retak pada bagian dinding kamar, dinding ruang tamu dan dinding kamar mandi. Luas Rumah P 15 m x L 9 m Luas Tanah 12 x 23 m. bahwa pada tahun 1995 Ibu Budiani Balanda membeli tanah dan membangun rumah, tahun 1997 mereka sudah menempati rumah tersebut. menurutnya dampak kerusakan rumah ini terjadi saat PLTA Poso energy melakukan peledakan batuan di sungai dan pengerukan sungai, awalnya retakan kecil tapi berjalannya waktu kerusakan semakin parah.



#### 16. Kardin Tenggeli/Petani

bapak kardin tenggeli seorang petani tinggal di desa sulewana, menurut beliau tempat tinggalnya terdampak akibat aktivitas PLTA Poso energy di pinggiran sungai, saat ini bagian belakang pondasi rumahnya mengalami retakan tanah pondasinya turun, bangunan rumah pun terlihat miring ke arah sungai. Luas rumah L 6 m x P 7 m



gambar bagian pondasi rumah yang retak Kardin Tenggeli

#### 17. Elvin tenggeli / petani

Ibu Elvin perempuan yang tinggal di desa sulewana, dia seorang petani pekerja keras, menggantungkan hidupnya dari bertani, menurut beliau rumahnya terdampak dari aktivitas PLTA Poso Energy yang melakukan peledakan batuan di sungai yang menimbulkan getaran kuat saat itu, dan juga semakin hari retakan yang awalnya kecil semakin besar terlihat di dinding rumahnya. dinding tempat tinggalnya rusak di bagian ruang tamu dan dibagian kamar tidur.



gambar retakan di dinding ruang tamu tempat tinggal ibu elvin

#### 18. Rut Rajatonda / petani

Ibu Rut ratonda seorang perempuan tinggal di desa sulewana, bekerja sebagai petani dan seorang ibu rumah tangga, menurut beliau sejak adanya PLTA Poso energy banyak perubahan negatif yang terjadi kepada masyarakat, banyak dari mereka sudah tidak bertani lagi karena pembebasan lahan di awal masuknya PLTA Poso energy. Tempat tinggalnya sangat dekat dengan sungai, tempat tinggalnya luas tanah L 6 m x P 10 m. Dampak kerusakan mulai dirasakan 10 tahun terakhir bagian teras tempat tinggalnya mengalami kemiringan tanah di bawah terlihat turun diduga akibat dari pengerukan dan peledakan batuan di sungai yang merupakan aktivitas dari PT Poso Energy.



gambar depan rumah  
ibu rut rajatonda

#### 19. Almudin Badjaji/Petani

Bapak Almudin adalah masyarakat desa Sulewana, saat ini tempat tinggalnya mengalami dampak kerusakan pada bagian dinding kamar tidur dan dinding dapurnya retak. Luas rumah P 9 m x L 7 m luas tanah P 40 x L 20 m. sejarah kepemilikan tanah dan bangunan tempat tinggal bapak Alimudin Badjaji merupakan peninggalan dari orang tuanya, tanah itu dulu adalah kebun cengkeh dan coklat. Tahun 1983 mereka membangun tempat tinggalnya (rumah) bersama keluarga kecilnya menurut beliau rumah tersebut adalah rumah pertama yang ada di kampung baru.



gambar dinding retak bagian kamar  
tidur tempat tinggal bapak almudin

#### 20. Miden Badjaji/Petani

Bapak Miden Badjaji tinggal di desa sulewana, seorang pekerja keras setiap hari nya berkegiatan di kebun menanam banyak tanaman seperti coklat dan padi ladang. menurutnya aktivitas PLTA Poso energy saat melakukan peledakan batuan di sungai mengakibatkan kondisi yang dialami tempat tinggalnya saat ini dinding bagian belakang rumahnya rusak, awalnya retakannya kecil berjalannya waktu retakanya semakin besar, tempat tinggal beliau luas rumah L 7 x P 9 luas tanah L20 x P 40



gambar dinding rumah yang retak  
rumah Miden Badjaji

## 21. Nince Tenggeli/Petani

Ibu Nince tenggeli seorang petani dan ibu rumah tangga, beliau merasakan dampak sejak PLTA Poso Energy melakukan aktivitas di pinggir sungai, rumahnya berada dekat dengan sungai, saat ini tempat tinggal beliau rusak terlihat banyak retakan pada bagian dinding dan lantai dapurnya. Luas rumah 10 m x 16 m. Sejarah tanah dan tempat tinggal ibu nince saat ini telah dimiliki sejak dari adanya Tarawana atau desa yang pertama kali ada di desa sulewana.



tempat tinggal ibu nince yang mengalami retakan di bagian dinding dapur

## 22. Jasmas siore / petani

Bapak Jasman siore, setiap hari beraktivitas di kebun, merupakan masyarakat desa Sulewana. menurutnya aktivitas PLTA Poso energy berdampak pada kondisi tempat tinggalnya saat dinding bagian kamar

tidur dan dinding belakang rumahnya rusak, hal ini bisa terjadi karena aktivitas PLTA di pinggiran sungai, beliau juga mengatakan jalan setapak yang biasa dilewati pergi berkebun, juga banyak yang rusak (terbelah), jalanan tersebut tepat berada di lokasi penampungan listrik milik perusahaan yang juga dekat dengan lokasi landasan terbang helikopter milik perusahaan. luas rumah bapak jasman L 7 m x P 9 m luas kintal L 10 m x P 50m



gambar kerusakan dinding kamar tidur bapak jasman siore

### 23. Yustan lempa penda / petani

bapak Yustan tinggal di desa sulewana, bekerja sebagai petani untuk memenuhi kehidupannya sehari - hari bersama keluarga, saat ini beliau dan keluarganya mengalami dampak kerusakan tempat tinggal menurutnya dampak kerusakan ini akibat dari aktivitas PLTA Poso Energy yang melakukan peledakan batuan dan pengerukan dasar sungai, tempat tinggalnya sangat dekat dengan sungai. Luas Rumah L 6 m x P 12 m Luas Tanah L 10 m x P 30 m. kerusakan nya sangat memprihatinkan, dinding bagian dapur hancur, lantai rumah rusak parah.



gambar kiri dinding rumah dan lantai yang hancur dan kanan bagian belakang rumah bapak yustan

#### 24. Gereja GKST Efrat Sulewana

Gereja GKST Efrat Sulewana, merupakan gereja pertama yang dibangun di desa sulewana, tempat ibadah ini memiliki nilai sejarah di mana masyarakat membangunnya bersama - sama untuk menjadi tempat ibadah mereka, lokasi tempat ibadah ini sangat dekat dengan sungai, selain rumah masyarakat tempat ibadah ini juga terdampak akibat dari aktivitas PLTA Poso energy yang melakukan aktivitas di sungai. kerusakan yang terjadi saat ini pagar tembok bagian belakang gereja telah hancur (roboh) dan dinding belakang dan samping gereja mulai retak, dan bagian depan juga terlihat retakan panjang di dinding.



gambar gereja GKST Efrat Sulewana dinding gereja dan pagar belakang mengalami retak dan potensi roboh.



Didukung oleh:

